

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh

LATHIFAH RIDLA AGUSTINA

NIM : 14520021

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

LATHIFAH RIDLA AGUSTINA

NIM : 14520021

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh
LATHIFAH RIDLA AGUSTINA
NIM : 14520021

Telah disetujui pada tanggal 13 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
NIDT 1975103020160801 2 048

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Hj. Nantik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

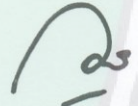
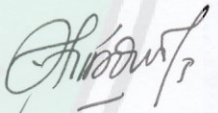

LATHIFAH RIDLA AGUSTINA

NIM : 14520021

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 26 Juni 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Sri Andriani, SE., M.Si : ()
NIP 19750313 200912 2 001
2. Pembimbing (Sekretaris)
Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA : ()
NIDT 1975103020160801 2 048
3. Penguji Utama
Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM : ()

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lathifah Ridla Agustina
NIM : 14520021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 26 Juni 2018

Hormat saya,



Lathifah Ridla Agustina

NIM : 14520021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin,

*Dengan terselesainya karya ini
beribu syukur tak hentinya ku panjatkan
kehadirat Allah SWT.*

Karya Ini Kupersembahkan Untuk

Ayah dan Ibu tersayang

*yang telah memberikan beribu pengorbanan
demi anaknya agar bisa meraih gelar sarjana*

*Untuk adik, nenek dan seluruh keluarga serta saudara
yang tidak hentinya memberikan semangat dan motivasi*

Teman-teman Akuntansi '14 yang saling membantu

Lollipop, teman yang luar biasa dan selalu manis

Billa dan Udho teman sebimbangan yang selalu kompak

Bu Nina yang selalu membimbing dengan sabar

*Dan semua Dosen yang telah memberikan ilmu serta
membimbing kami dalam melewati empat tahun ini*

Untuk mereka yang selalu mendoakanku dengan ikhlas

Terimakasih untuk semua pihak yang telah

membantu menyelesaikan karya ini

Terimakasih UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

Amin Yarobbal Alamin

HALAMAN MOTTO

“Jangan terus tertidur untuk bisa bermimpi,
Tapi bangunlah untuk bisa mewujudkan mimpi itu”

“Saat malas membelenggu,
katakana dengan tegas pada dirimu
Bangun.... Bangun... Bangun...
Atau mimpimu hanya akan menjadi rasa kecewa”

“Bersyukur dan Ikhlas adalah senjata terampuh
untuk bisa bahagia dalam keadaan apapun”

“Awali semua perjalanan hidup karena Allah SWT”

“Setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka bersabarlah”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia” dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga serta seluruh umat yang mengikuti Beliau hingga akhir zaman.

Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya pada bidang Akuntansi Sektor Publik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan fasilitas kepada penulis.
6. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil pada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. PPID Kemenkeu serta Subdit DKD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah memberikan informasi seadai data penelitian ini.
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam mendukung serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhir kata, semoga seluruh bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Malang, 13 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1	L
atar Belakang	1
1.2	R
umusan Masalah	5
1.3	T
ujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1	P
enelitian Terdahulu	7
2.2	K
ajian Teoritis	13
2.2.1	P
endapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.2.2	D
ana Perimbangan	18
2.2.3	B
elanja Modal	21
2.2.4	U
kuran Pemerintah Daerah	22
2.2.5	K
inerja Keuangan Pemerintah	22
2.2.6	I
ntegrasi Islam	25
2.3	K
erangka Konseptual	28
2.4	H
ipotesis Penelitian	29

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1	J
enis dan Pendekatan Penelitian	33
3.2	L
okasi Penelitian	33
3.3	P
opulasi dan Sampel Penelitian	33
3.4	T
eknik Pengambilan Sampel	34
3.5	D
ata dan Jenis Data	34
3.6	T
eknik Pengumpulan Data	35
3.7	D
efinisi Operasional Variabe	35
3.7.1	P
endapatan Asli Daerah (PAD)	36
3.7.2	D
ana Alokasi Umum (DAU)	37
3.7.3	D
ana Alokasi Khusus (DAK)	37
3.7.4	B
elanja Modal	38
3.7.5	U
kuran Pemerintah Daerah	38
3.7.6	K
inerja Keuangan Pemerintah	39
3.8	A
nalisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1	H
asil Penelitian	44
4.1.1	G
ambaran Umum	44
4.1.2	A
nalisis Deskriptif	55
4.1.3	U
ji Asumsi Klasik	56
4.1.3.1	U
ji Normalitas	56
4.1.3.2	U
ji Multikolinearitas	57
4.1.3.3	U
ji Heterokedasitas	58

4.1.3.4	U
ji Autokorelasi	59
4.1.3.5	U
ji Regresi Linear Berganda	60
4.1.4	U
ji Hipotesis	62
4.1.4.1	U
ji t { Parsial)	62
4.1.4.2	U
ji F (Simultan)	64
4.1.4.3	U
ji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.2	P
embahasan	66
4.2.1	P
engaruh Parsial PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	66
4.2.1.1	P
engaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	66
4.2.1.2	P
engaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	67
4.2.1.3	P
engaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	68
4.2.1.4	P
engaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	69
4.2.1.5	P
engaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	71
4.2.2	P
engaruh Simultan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	73
BAB V PENUTUP	74
5.1	K
esimpulan	74
5.2	S
aran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Pengambilan Sampel.....	34
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Data Obyek Penelitian	44
Tabel 4.2 PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2014.....	46
Tabel 4.3 Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2014.....	47
Tabel 4.4 PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2015.....	49
Tabel 4.5 Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2015.....	50
Tabel 4.6 PAD dan PDana Perimbangan Provinsi Tahun 2016.....	52
Tabel 4.7 Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2016.....	53
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif	55
Tabel 4.9 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.10 Uji Multokolinearitas	57
Tabel 4.11 Uji Heterokedasitas	58
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.14 Uji F (Simultan)	65
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PAD Provinsi tahun 2014-2016

Lampiran 2 DAU Provinsi tahun 2014-2016

Lampiran 3 DAK Provinsi tahun 2014-2016

Lampiran 4 Belanja Modal Provinsi tahun 2014-2016

Lampiran 5 Total Aset Provinsi tahun 2014-2016

Lampiran 6 Rasio Kemandirian Provinsi tahun 2014

Lampiran 7 Rasio Kemandirian Provinsi tahun 2015

Lampiran 8 Rasio Kemandirian Provinsi tahun 2016



ABSTRAK

LathifahRidlaAgustina. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”.

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan merupakan alat bagi masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas dan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data APBD, RAPBD dan Neraca Provinsi di Indonesia selama tahun 2013-2016 yang telah diaudit. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui permintaan informasi melalui e-mail. Terdapat 34 propinsi yang menjadi sampel penelitian ini yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan syarat memiliki data yang telah diaudit dan memiliki data yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja.

Hasil Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara individual PAD, DAK dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan DAU dan belanja modal secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa PAD, dana perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

LathifahRidlaAgustina. 2018, THESIS. Tittle: "The Effect of Local Revenue, Fund Balance, Capital Expenditure and Local Government Size to The Financial Performance of Province Government in Indonesia".

Advisor : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

Keywords : Local Revenue, Fund Balance, Capital Expenditure, Local Government Size, Financial Performance

Measurement of financial performance is a tool for the people to know the accountability and responsibility of the government in carrying out its duties. Several factors affecting the financial performance of local government. They are Local Revenues, Balancing Funds, Capital Expenditures and Local Government Size proxied by total assets. The purpose of this study aims to examine the effect of Local Revenue, Fund Balance, Capital Expenditure and Local Government Size to The Financial Performance of Province Government in Indonesia.

This study uses APBD, RAPBD and Province Balance in Indonesia during the year 2014-2016 that has been audited. The data is obtained from the Directorate General of Fiscal Balance by requesting public information by e-mail. There are 34 provinces that become the sample of this study which is taken using purposive sampling method with the requirement to have data that have been audited and have data that can be used for performance measurement.

The results of this study show the results that individually PAD, DAK and size of local government significantly influence the financial performance of local governments. While DAU and capital expenditure individually do not affect the financial performance of local government. Tests simultaneously indicate that PAD, fund balance that proxied with DAU and DAK, capital expenditures and size of local government significantly influence the financial performance of local governments.

المستخلص

لطيفة ريدأ كوستينا، ٢٠١٨، بحثا علمي، الموضوع

"تأثير الإيرادات اقليمية الاصلية، وصناديق المعادلة، والنفقات الراسمالية، وحجم استجابة الحكومة المحلية للأداء المالي المقاطع
عها الحكماء محلياً في اندونيسيا".

المشرفة: نينا دوستينا نغسيها ماجستير الحاجة

الكلمة الرئيسية:

تأثير الإيرادات اقليمية الاصلية، وصناديق المعادلة، والنفقات الراسمالية، وحجم استجابة الحكومة المحلية للأداء المالي

ومثلياً قياساً لأداء المالية اءاها للجمهور لمعرفة مسؤوليها الحكومة ومساءلتها فإدارها عمالها.

ومنا العوا مالا لتتؤثر على أداء المالية للحكومة المحلية بما لا يرد اتالا أصلي، وصناديق المعادلة، والنفقات الراسمالية، وحجم
الحكومة المحلية (الموكل) حسب مجموعاً أصول.

وكان الغرض من هذا الدراسة هو دراسة تأثير الإيرادات اقليمية الاصلية، وصناديق المعادلة لدخل، والنفقات الراسمالية،
وحجم استجابة الحكومة المحلية للأداء المالي المقاطعها الحكماء محلياً في اندونيسيا.

ويستخدم هذا البحث من البيانات، RAPBD والتوازن في المقاطعات في اندونيسيا على مدار العام الماضي ٢٠١٣-
٢٠١٦ التي تم مراجعتها.

البيانات التي تم الحصول عليها من المديرية العامة للمساواة المالية عن طريق المعلومات المطلوبة عن طريق البريد الالكتروني.

هناك ٣٤ المقاطعات التي أصبحت هذه العينة البحثية التي اتخذت باستخدام طريقة *purposive*

sampling أخذ العينات عشوائياً ليكونا البيانات التي تم مراجعتها والبيانات التي تم استخدامها القياساً لأداء.

وأظهرت نتائج هذا الدراسة النتائج التي تحققها صندوق معادلهامساواة بشكل فردياً تراها ما في أداء المالية للحكومة
محلية.

وفي حين أن اللوحة، والنفقات الراسمالية هو حجم الحكومة اقليمية الاصلية الموكل مع مجموعاً أصول بشكل فردياً لا يؤثر على أداء
المالية للحكومة المحلية.

وفي الوقت نفسه، وتظهر الاختبار المتزامنة ان صندوق معادلهامساواة، والنفقات الراسمالية، وحجم الحكومة ما
محلية، لها اثير كبير في التنفيذ المالية للحكماء محلي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat berhak melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik sebagai pertanggung jawaban pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusuma, 2017). Keuangan daerah dalam APBD itu sendiri menurut Tausikal (2008) dalam Putry dan Badrudin (2017) merupakan sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan mempertanggungjawabkannya untuk mendorong kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

PAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya sendiri dengan optimal sehingga daerah tersebut akan memperoleh sumber penerimaan yang berasal dari daerah mereka sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD suatu daerah akan menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat menggunakan sumber

pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Apabila PAD suatu daerah lebih besar dari pendapatan lainnya, maka akan semakin baik kinerja keuangannya.

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah (Armajadkk., 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini diberikan kepada daerah karena setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi daerah yang berbeda dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Apabila pengeluaran daerah untuk membiayai jalannya pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat lebih besar dari pendapatan yang dihasilkan daerahnya sendiri, maka pemerintah daerah bisa menggunakan dana dari pemerintah pusat yaitu dana perimbangan untuk menutupi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah juga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian suatu daerah. Dana perimbangan yang utama mempengaruhi kemandirian yaitu DAU dan DAK. Kedua ini merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka menjalankan desentralisasi fiskal pada daerah-daerah yang dinaunginya.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sudarsan, 2013 dalam Mulyani dan Wibowo, 2017). Semakin besar belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja daerah, maka akan semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat terlihat dari pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dijalankan. Hal ini merujuk pada seberapa besar pemerintah daerah menggunakan dananya untuk belanja modal sebagai langkah meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Ukuran pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat atas akuntabilitas kinerjanya akan semakin besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991 dalam Sari, 2016). Penelitian ini menggunakan ukuran daerah dengan total aset sebagai proksinya karena nilainya lebih stabil sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan dengan menggunakan variabel independen yang berbeda-beda sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, DAU, DAK, belanja modal, belanja daerah, *leverage*, ukuran legislatif, ukuran pemerintah daerah, temuan dan opini audit BPK. Dalam penelitian ini penulis memilih lima faktor yang

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang diprosikan dengan DAU dan DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Lima faktor ini dipilih karena dari beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda. Adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu menjadikan penulis termotivasi untuk memperluas pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan pemerintah provinsi di Indonesia sebagai objeknya. Pemerintah daerah provinsi dipilih sebagai objek karena provinsi merupakan pemerintah daerah yang tingkatnya berada tepat dibawah pemerintahan pusat, sehingga APBD yang dimiliki pemerintah provinsi didalamnya telah mencakup dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah kota/ kabupaten.

Peraturan tentang mekanisme pemberian dana transfer daerah kini mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu isi dari peraturan itu menyatakan bahwa DAU sudah tidak bersifat final lagi. Sebelum diberlakukan aturan tersebut, DAU yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah bersifat final, yaitu tidak akan berubah bila sudah ditetapkan didalam APBN. Namun, saat ini DAU bisa berkurang atau bertambah tergantung dari jumlah pendapatan negara. Menurut DirektoratJenderal Perimbangan Keuangan, selama ini pemerintah pusat selalu menanggung defisit anggaran APBN akibat pendapatan dan belanja negara yang tidak seimbang.

Defisit yang dialami negara harus bias ditutupi sehingga pemerintah harus berhutang agar bisa menyalurkan belanja negara termasuk dana transfer didalamnya. Namun, Kemenkeu menyatakan bahwa tidak semua penda menggunakan anggaran secara optimal dan banyak yang mengendap di daerah. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan aturan ini diharapkan dapat menyadarkan dan mendidik pemerintah daerah agar bisa mengelola anggaran dengan optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sukma, 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang diprosikan dengan DAU dan DAK, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Peneliti, untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah melalui tingkat kemandiriannya sehingga kita bisa berpartisipasi dalam memajukan pembangunan di daerah tersebut.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan penelitian sejenis dan memperluas wawasan dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk mengkaji kembali peraturan yang telah diberlakukan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 4) Bagi investor, untuk menilai keuntungan atau kerugian yang didapat apabila ingin berinvestasi pada suatu daerah serta menambah wawasan dan informasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kusuma (2017)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota/ Kabupaten di Jawa Timur)	Kuantitatif	Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat kemakmuran yang diprosikan dengan total PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan yang diprosikan dengan total DAU secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel <i>leverage</i> secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2.	Mulyani dan Wibowo (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan jumlah penduduk berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah,

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

		di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)		<i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3.	Jauhar (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat	Kuantitatif	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4.	Aziz (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur)	Kuantitatif	Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah
5.	Sari (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, <i>Leverage</i> , Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan	Kuantitatif	Ukuran Pemerintah Daerah yang diprosikan dengan total aset, PAD, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran legislative tidak

		Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/ Kota Pulau Sumatera)		berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
6.	Masdiantini dan Erawati (2016)	Pengaruh Ukura Pemerintah Daerah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Bali	Kuantitatif	Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total pendapatan dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran yang diprosikan dengan PAD, <i>intergovernmental revenue</i> dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Bali
7.	Armaja dkk. (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/ Kota di Aceh)	Kuantitatif	Kekayaan daerah yang diprosikan dengan PAD berpengaruh negatif, dana perimbangan dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/ kota di Aceh
8.	Abdullah dkk. (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan	Kuantitatif	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	Ariani dan Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kuantitatif	Belanja Modal dan DAU berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Sumber: data diolah, 2018

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian Kusuma (2017) menggunakan variabel independen kemakmuran pemerintah daerah yang didalamnya diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah (total aset), kemakmuran (PAD), ketergantungan (DAU), leverage, dan belanja daerah yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis juga menggunakan PAD dan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai variabel independen. Perbedaannya terdapat pada variabel lain yang digunakan yaitu penulis menggunakan variabel dana perimbangan yang didalamnya tidak hanya melibatkan DAU saja melainkan juga menggunakan DAK. Selain itu, penulis juga menggunakan variabel belanja modal. Kusuma (2017) dalam penelitiannya menggunakan rasio efisiensi dalam pengukuran kinerja. Sedangkan penulis menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek dari kedua penelitian juga berbeda.

Penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) memiliki persamaan variabel independen dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan PAD. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penulis memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan total aset. Sedangkan Mulyani dan Wibowo (2017) memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan jumlah penduduk. Selain itu, penulis menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) menggunakan rasio efisiensi.

Jauhar (2016) menggunakan dua variabel independen yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan PAD, DAU, DAK dan belanja modal. Perbedaannya yaitu penulis menambahkan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai variabel independen sedangkan penelitian Jauhar (2016) tidak menggunakan variabel tersebut. Peneliti menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Jauhar (2016) menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi PAD untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Aziz (2016) menggunakan karakteristik pemerintah dengan menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, dana perimbangan dan belanja daerah sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penulis juga menggunakan variabel yang sama kecuali belanja daerah. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis menambahkan PAD dan belanja modal sebagai variabel. Selain itu penulis memproksikan dana perimbangan dengan DAU dan DAK. Aziz (2016) menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian sebagai proksi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sari (2016) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Keduanya menggunakan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian Sari (2016) juga menggunakan variabel

leverage dan ukuran legislative sedangkan penulis tidak. Sebaliknya. Penulis menggunakan variabel belanja modal dan menggunakan DAU dan DAK sebagai proksi sedangkan Sari (2016) tidak menggunakannya. Selain itu penulis menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian Sari (2016) menggunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya menggunakan ukuran pemerintah daerah, PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menggunakan variabel opini audit BPK dan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan sedangkan penulis tidak. Sebaliknya. Penulis menggunakan variabel belanja modal, ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset dan dana perimbangan yang diproksikan dengan DAU dan DAK yang tidak digunakan dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016).

Penelitian Armaja dkk. (2015) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Keduanya menggunakan PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaannya adalah pada penelitian Armaja dkk. (2015) menggunakan belanja daerah. Sedangkan penulis menggunakan belanja modal dan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Selain itu, pada penelitian ini dana perimbangan diproksikan dengan DAU dan DAK.

Abdullah dkk. (2015) menggunakan tiga variabel independen yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan PAD, DAU dan DAK. Perbedaannya adalah penelitian ini juga menggunakan belanja modal serta ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset sebagai variabel independen.

Ariani Putri (2016) menggunakan variabel belanja modal dan DAU sebagai variabel independen seperti penelitian ini dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen. Perbedaannya penelitian ini menggunakan PAD, DAK, dan ukuran pemerintah daerah sebagai variabel independen serta menggunakan kemandirian keuangan daerah sebagai proksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Ariani dan Putri (2016) tidak menggunakannya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber penerimaan dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian lain

juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakatnya berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU No 33 tahun 2004). Kewenangan ini diharapkan dapat menjadi motivasi setiap pemerintah daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki daerahnya agar dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian, kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercukupi dengan PAD. Jika PAD suatu daerah meningkat tiap masanya dan bisa mencukupi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian yang baik.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dikelompokkan sebagai berikut.

(1) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kebada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

(2) Retribusi Daerah;

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa Retribusi Daerah atau retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

(a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

(b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN

(c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

(a) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

(b) jasa giro;

(c) pendapatan bunga;

(d) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

(e) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- (f) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
- (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (h) pendapatan denda pajak;
- (i) pendapatan denda retribusi;
- (j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (k) pendapatan dari pengembalian;
- (l) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- (m) pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
- (n) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2.2 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal atau sebagai sarana penyeimbang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical balance*) serta sebagai penyeimbang keuangan antara pemerintah daerah satu dengan yang lainnya (*horizontal balance*) (Prastiwi dkk.,2016).

Dana Perimbangan digolongkan menjadi tiga kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut.

(1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). Pada dasarnya dana bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu dana bagi hasil pajak (*tax sharing*) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (*natural resources sharing*) atau dapat disebut sebagai dana bagi hasil non pajak. Dana bagi hasil pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam meliputi bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Iuran Tetap (*Land Rent*), Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Pungutan Pengusahaan Perikanan, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Dasar hukum yang membahas tentang DAU terdapat dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pengalokasian DAU dilakukan untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besar jumlah DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU yang diberikan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Penghitungan DAU melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap akademis. Tahap ini merupakan konsep awal dalam penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU yang dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas yang bertujuan untuk memperoleh kebijakan mengenai penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia. Tahap yang kedua yaitu tahap administratif. Kementerian Keuangan c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan data dasar penghitungan DAU serta melakukan konsolidasi dan verifikasi data. Tahap yang ketiga yaitu tahap teknis. Tahap ini adalah tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan seperti yang telah ditentukan dalam UU dengan menggunakan data yang tersedia dan mempertimbangkan rekomendasi dari pihak akademis. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap Politis dimana dilakukan pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panitia Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi serta persetujuan dari hasil penghitungan DAU. Formulasi dalam menghitung DAU antara lain sebagai berikut.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan : AD = Gaji PNS Daerah

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

$$\text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} = \text{TBR} (\delta_1 \text{ IP} + \delta_2 \text{ IW} + \delta_3 \text{ IPM} + \delta_4 \text{ IKK} + \delta_5$$

IPDRB/kap)

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita

δ = Bobot Indeks

$$\text{Kapasitas Fiskal (KpF)} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Penerimaan SDA

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji PNSD tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan penggajian PNS yang berlaku. Sedangkan celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Dasar hukum yang mengatur mengenai DAK yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, dan PMK Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan oleh beberapa kriteria. Kriteria umum yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria khusus yaitu kriteria yang dirumuskan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknik yaitu kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Penentuan alokasi DAK dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK yang mana daerah tersebut harus memenuhi tiga kriteria yang telah disebutkan. Tahap kedua yaitu menentukan besaran alokasi DAK untuk masing-masing daerah dengan

perhitungan indeks dan ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dan Menteri Teknis yang menyusun Juknis menggunakan DAK.

2.2.3 Belanja Modal

Menurut Halim (2008), “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/ aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal itu sendiri terbagi atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jaringan (jalan, irigasi dan lainnya).

2.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Kusuma (2017) menyatakan bahwa ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu. Suatu organisasi juga bisa diketahui besarnya melalui ukuran organisasi tersebut. Ukuran suatu organisasi dapat kita ketahui dari sudut pandang fisik maupun non fisiknya. Jika dihubungkan dengan konteks pengukuran kinerja, maka suatu organisasi tidak bisa diukur dari fisiknya, melainkan harus diukur dari non fisiknya. Demikian juga pengukuran untuk mengukur suatu pemerintah daerah. Menurut Damanpour (1991) dalam Sari (2016) ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas.

2.2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah

Moehariono (2009) menyatakan bahwa pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menuntut adanya akuntabilitas pemerintah dengan mengetahui kualitas kinerja dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kualitas kinerja pemerintah dapat diketahui melalui ukuran yang sudah ditetapkan sebagai acuan atau tolok ukur. Menurut Mulyadi (2004), ukuran kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan non keuangan . Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kinerja keuangan oleh pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian lain disebutkan juga dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengartikan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sari (2016) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD karena

didalamnya secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2008). Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan *value for money* yaitu dengan menguji tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja. Sedangkan menurut Halim (2008), pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang menggunakan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efektivitas dan efisiensi (Mardiasmo, 2009). Ekonomi, merupakan perolehan masukan (*input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan yang terjadi dengan nilai masukan yang seharusnya. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Analisis rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia (Halim, 2008). Pada sektor publik, analisis rasio

digunakan pada APBD setiap daerah dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Analisa rasio keuangan dapat menguji enam rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian yang terdapat dalam rasio aktifitas sebagai proksi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2008). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapata transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi.

2.2.6 Integrasi Islam

Pemerintah merupakan pemimpin dari suatu wilayah yang bertugas untuk menyelenggarakan segala kegiatan dalam upaya mencapai tujuan bersama dari wilayah tersebut. Mereka mendapat amanah dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan bersama. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ibn umar r.a berkata : aku sudah mendengar rasulullah saw bersabda : tiap-tiap orang merupakan pemimpin & bakal diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Satu Orang kepala negeri dapat diminta pertanggungjawaban faktor rakyat yg dipimpinnya. Seseorang suami dapat ditanya aspek keluarga yg dipimpinnya. Seseorang isteri yg memelihara rumah tangga suaminya dapat ditanya elemen tanggungjawab & tugasnya. Bahkan satu orang pembantu/pekerja rumah tangga yg bertugas memelihara barang milik majikannya pula bakal ditanya dari elemen yg dipimpinnya. & anda sekalian pemimpin & bakal ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal faktor yg dipimpinnya”. (H.R. Buchori Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bahwa semua pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas wewenang yang dimiliki karena inti dari kepemimpinan adalah tanggung jawab. Pemimpin memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan rakyat adalah pihak yang merasakan dampak dari kinerja pemimpin mereka. Pemimpin harus memberi pertanggung jawaban apakah kinerja mereka sudah baik dan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap adil dan menyampaikan hasil kinerjanya sesuai fakta seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT pada Al-Qur'an surat Shad ayat 26 sebagai berikut.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ (٢٦)

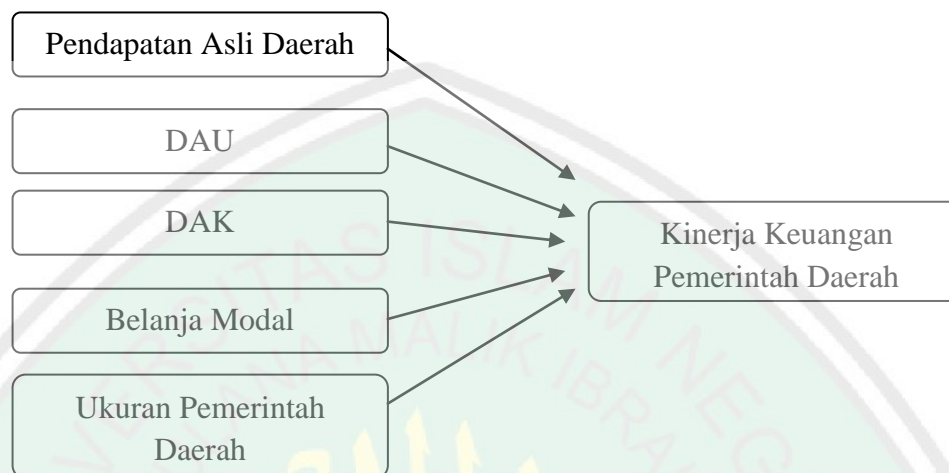
“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”(Q.S. Shaad:26)

Pemimpin harus bisa menjaga amanah dengan baik. Mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Saat ini tidak sedikit pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Mereka mengambil hak rakyat yang seharusnya dikelola guna memenuhi kesejahteraan rakyat. Dampak dari perbuatan mereka akhirnya rakyat menjadi korban. Pemimpin yang seharusnya mengayomi rakyat, sebaliknya membuat rakyat sengsara. Allah SWT sangat membenci perbuatan tersebut dan dalam ayat di atas pemimpin yang seperti itu akan mendapatkan azab yang berat di akhirat kelak. Hal ini menyadarkan kita bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya kepada rakyat saja, namun juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang baik harus bisa menjaga kualitas kinerjanya sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diemban.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat tentunya tidak lepas dari kontrol pemerintah pusat dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menganut demokrasi ini. Kontrol ini dapat dilakukan dengan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini akan menguji pengaruh dari beberapa faktor terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor ini dipilih dari beberapa penelitian terdahulu dan diambil dari data realisasi APBD dan neraca selama tahun 2014-2016 yang telah dipublikasikan oleh instansi pemerintah Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan republik Indonesia. Penulis akan menguji kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan ukuran rasio kemandirian.

2.4 Hipotesis

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayah itu sendiri. Tingkat kemandirian suatu daerah bisa dilihat dari besarnya PAD yang dihasilkan karena dengan begitu dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Jauhar (2016) dalam penelitiannya pada kabupaten/ kota di Sumatera Barat menyatakan bahwa besar kecilnya PAD yang dihasilkan suatu daerah akan mempengaruhi tinggi rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian serupa yang dilakukan oleh Masdiantini dan Erawati (2016) pada kabupaten/ kota di Bali menyatakan bahwa kemakmuran yang diprosikan dengan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa :

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan sesuai dengan kriteria yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan dalam membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program kerjanya. Besarnya DAU yang dimiliki suatu daerah menentukan tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah

pusat. Mulyani dan Wibowo (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian DAU ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat sehingga semakin besar dana perimbangan yang diberikan maka pengawasan oleh pemerintah pusat akan semakin besar. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pengawasan ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) telah menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan yang diprosikan dengan total DAU secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa :

H_2 : DAU berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Dana ini diperuntukan pada daerah-daerah yang membutuhkan prioritas khusus agar dapat memajukan daerahnya minimal setara dengan daerah lainnya. Dana ini dapat menggambarkan kemandirian keuangan suatu daerah. Penelitian oleh Jauhar (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Penelitian Abdullah dkk. (2015) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.. Dari kedua penelitian tersebut, peneliti menarik hipotesis sebagai berikut.

H₃ : DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan keseluruhan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari satu periode atau satu tahun. Besarnya belanja modal menggambarkan besarnya pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang akan berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sudarsan, 2013 dalam Mulyani dan Wibowo, 2017). Mulyani dan Wibowo (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Jauhar (2016) menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa :

H₄: Belanja modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah tersebut. Ukuran ini dapat diketahui dengan berbagai hal. Penelitian ini memproksikan ukuran pemerintah daerah dengan total aset yang dimiliki karena jumlahnya lebih stabil. Cooke (1992) dalam Aziz (2016) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari suatu entitas maka tekanan yang dimiliki akan semakin besar. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dengan aset yang dimiliki akan memiliki tuntutan yang besar dari masyarakat ataupun pemerintah pusat untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aziz (2016) telah membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Kusuma (2017) menyatakan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa :

H_5 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2018). Data yang diperoleh akan diukur secara objektif menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio kemandirian dan *value for money*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan korelasi karena meneliti tentang hubungan dari variabel independen dan variabel dependen (Yusuf, 2014)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data APBD, RAPBD dan neraca dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi dipilih sebagai objek karena provinsi merupakan daerah pemerintahan yang tingkatnya tepat berada dibawah pemerintahan pusat sehingga data yang dihasilkan diharapkan dapat menggeneralisasi.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan gambaran dari data atau kejadian yang akan kita teliti dalam jumlah besar dan daerah yang luas (Yusuf, 2014). Sampel merupakan beberapa atau sebagian dari populasi yang terpilih untuk mewakili populasi

tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh pemerintah daerah provinsi yang datanya memenuhi syarat dan dapat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang berarti sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang dihasilkan bersifat representatif. Kriteria dari sampel yang digunakan yaitu data APBD, RAPBD dan neraca pemerintah daerah provinsi yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama tahun 2014-2016 secara berturut-turut serta mengandung data yang dibutuhkan untuk perhitungan rasio kemandirian.

Tabel 3.1
Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi APBD, RAPBD dan Neraca yang tidak memenuhi syarat	34 Provinsi <u>0 Provinsi</u>
Jumlah Sampel	34 Provinsi

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/ instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data yang digunakan adalah data realisasi APBD dan

neraca dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informasi APBD, RAPBD dan neraca pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2014-2016. Data tersebut dapat diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui permintaan informasi publik dan e-mail. Data diolah menggunakan bantuan *software* statistik SPSS .

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Definisi dan Pengukuran
Variabel Independen (X)			
1.	X1	Total penerimaan yang berasal dari wilayah sendiri (PAD)	PAD merupakan simbol dari Pendapatan Asli Daerah diukur dengan : PAD= Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah
2.	X2	DAU	Jumlah penerimaan DAU
3.	X3	DAK	Jumlah penerimaan DAK
4.	X4	Jumlah seluruh pengeluaran untuk memperoleh aset tetap/ investasi (Belanja Modal)	BM merupakan simbol dari Belanja Modal diukur dengan : BM = Belanja Tanah + Peralatan & Mesin + Gedung & Bangunan + Jalan, Irigasi, Jaringan + Konstruksi dalam Pengerjaan + Aset Lainnya

5.	X5	Total aset yang dimiliki daerah (Ukuran Pemerintah Daerah)	UPD merupakan simbol dari Ukuran Pemerintah Daerah diukur dengan : UPD = Total Aset
Variabel Dependen (Y)			
5.	Y	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Y merupakan simbol dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan : Rasio Kemandirian = $\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}}$

3.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004).PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang diperoleh suatu daerah menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerahnya. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka tingkat kemandiriannya akan semakin tinggi. Hal itu dikarenakan jika semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut mampu mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakatnya menggunakan pendanaan yang dihasilkan sendiri tanpa harus bergantung pada pemberian transfer dari pemerintah pusat.

3.7.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016).. Pengalokasian DAU dilakukan untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besar jumlah DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU yang diberikan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

3.7.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016). Mekanisme pengalokasian DAK ditentukan oleh beberapa kriteria. Kriteria umum yaitu kriteria yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kriteria khusus yaitu kriteria yang dirumuskan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria teknik yaitu kriteria yang

disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

3.7.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal dapat menunjang kegiatan yang produktif untuk jangka panjang dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai wujud pelayanan masyarakat.

3.7.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Damanpour (1991) dalam Sari (2016) ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas. Penelitian ini memproksikan ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) karena jumlahnya lebih stabil. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka hal itu akan mempermudah kegiatan operasional dan pelayanan masyarakat serta akan mempermudah dalam memperoleh PAD sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik (Kusuma, 2012 dalam Sari, 2016).

3.7.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016). Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian.

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2008). Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapata transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini akan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

3.8 Analisis Data

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) sebagai alat analisis karena penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu. Analisis merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2006).

1) Uji Normalitas

Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5% atau 0,05. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik apabila diuji multikolinearitanya maka tidak akan berkorelasi.. Cara mengetahui multikolinieritas di dalam suatu model penelitian yaitu dengan cara melihat *Tolerance* dan *Variance Infaltion Factors (VIF)* dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui hasilnya adalah hasil uji variabel tidak mengalami korelasi apabila nilai *Tolerance* < 0.5 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2006).

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data

runtut waktu (time series) karena gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Ghazali (2006), jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model penelitian, maka akan digunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.8.2 Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi

(tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya (Yusuf, .2014).

1) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

PAD (X1) = Pendapatan Asli Daerah

DAU (X2) = Dana Alokasi Umum

DAK (X3) = Dana Alokasi Khusus

Belanja Modal (X4) = Belanja Modal

Total Aset (X5) = Ukuran Pemerintah Daerah

e = Item eror

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah provinsi sebagai objek penelitian. Pemerintah Provinsi adalah tingkat pemerintahan yang tepat berada dibawah pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga menaungi pemerintah kota/kabupaten yang ada di setiap provinsi. Populasi dari penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu data yang digunakan yaitu selama tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sample* yaitu pengambilan data dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan digunakan. Terdapat 34 provinsi yang memenuhi syarat pengambilan sampel, sehingga dapat diketahui jumlah data yang diteliti adalah 102 data. Berikut adalah nama-nama provinsi yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4.1
Data Obyek Penelitian

NO	NAMA PROVINSI
1	Prov. Aceh
2	Prov. Sumatera Utara
3	Prov. Sumatera Barat
4	Prov. Riau
5	Prov. Jambi
6	Prov. Sumatera Selatan
7	Prov. Bengkulu
8	

Tabel 4.1 (Lanjutan)
Data Obyek Penelitian

9	Prov. DKI Jakarta
10	Prov. Jawa Barat
11	Prov. Jawa Tengah
12	Prov. DI Yogyakarta
13	Prov. Jawa Timur
14	Prov. Kalimantan Barat
15	Prov. Kalimantan Tengah
16	Prov. Kalimantan Selatan
17	Prov. Kalimantan Timur
18	Prov. Sulawesi Utara
19	Prov. Sulawesi Tengah
20	Prov. Sulawesi Selatan
21	Prov. Sulawesi Tenggara
22	Prov. Bali
23	Prov. Nusa Tenggara Barat
24	Prov. Nusa Tenggara Timur
25	Prov. Maluku
26	Prov. Papua
27	Prov. Maluku Utara
28	Prov. Banten
29	Prov. Bangka Belitung
30	Prov. Gorontalo
31	Prov. Kepulauan Riau
32	Prov. Papua Barat
33	Prov. Sulawesi Barat
34	Prov. Kalimantan Utara

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Semua populasi dalam penelitian ini memenuhi persyaratan yang dibutuhkan yaitu telah diaudit dan mengandung informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian. Berikut adalah data PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset dari 34 provinsi diatas selama tahun 2014-2016.

Tabel 4.2
PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2014
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	DAPER
1.	Prov. Aceh	1.731.130.839.637	2.551.683.310.691
2.	Prov. Sumatera Utara	4.416.811.865.267	1.812.638.981.079
3.	Prov. Sumatera Barat	1.729.222.284.040	1.333.059.018.233
4.	Prov. Riau	3.245.087.745.090	4.231.808.633.743
5.	Prov. Jambi	1.281.239.472.808	1.514.518.389.008
6.	Prov. Sumatera Selatan	2.422.673.788.769	2.982.866.000.798
7.	Prov. Bengkulu	672.064.468.249	1.104.582.675.517
8.	Prov. Lampung	2.274.685.572.913	1.472.486.568.518
9.	Prov. DKI Jakarta	31.274.215.885.720	9.677.533.225.272
10.	Prov. Jawa Barat	15.038.153.309.919	3.260.505.636.017
11.	Prov. Jawa Tengah	9.916.358.231.432	2.542.626.744.680
12.	Prov. DI Yogyakarta	1.464.604.954.200	1.013.811.389.590
13.	Prov. Jawa Timur	14.442.216.534.959	3.485.336.767.166
14.	Prov. Kalimantan Barat	1.621.610.890.849	1.531.868.902.983
15.	Prov. Kalimantan Tengah	1.253.708.122.296	1.557.416.499.094
16.	Prov. Kalimantan Selatan	2.898.704.954.480	1.523.714.615.711
17.	Prov. Kalimantan Timur	6.663.113.274.491	4.253.320.982.625
18.	Prov. Sulawesi Utara	937.681.926.708	1.093.949.317.889
19.	Prov. Sulawesi Tengah	824.611.352.385	1.239.776.947.097
20.	Prov. Sulawesi Selatan	3.029.122.238.496	1.531.374.909.824
21.	Prov. Sulawesi Tenggara	599.942.751.257	1.236.016.579.241
22.	Prov. Bali	2.920.416.697.075	1.018.431.008.887
23.	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.115.060.397.173	1.212.086.447.141
24.	Prov. Nusa Tenggara Timur	763.300.806.702	1.282.745.347.275
25.	Prov. Maluku	425.425.607.781	1.165.471.923.932
26.	Prov. Papua	944.929.691.841	2.643.812.996.686
27.	Prov. Maluku Utara	203.059.697.910	1.089.674.338.801
28.	Prov. Banten	4.899.125.691.766	1.159.872.633.113
29.	Prov. Bangka Belitung	563.108.840.861	1.025.142.797.595
30.	Prov. Gorontalo	281.920.210.039	800.313.828.654
31.	Prov. Kepulauan Riau	1.070.208.288.698	1.664.959.883.176
32.	Prov. Papua Barat	306.674.697.583	2.783.645.234.923
33.	Prov. Sulawesi Barat	222.635.496.656	857.098.934.754
34.	Prov. Kalimantan Utara	11.833.885.267	1.228.625.712.846

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.2 menggambarkan tentang jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang diterima Provinsi selama Tahun 2014. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD Rp. 31.274.215.885.720 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 9.677.533.225.272. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Utara sejumlah Rp. 11.833.885.267 dan Dana Perimbangan terendah dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 800.313.828.654. Terdapat 14 Provinsi yang mampu menghasilkan jumlah PAD lebih tinggi dari pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. Masih terdapat 120 Provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan jumlah Dana Perimbangannya. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa masih banyak provinsi yang bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 4.3
Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2014
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	Total Aset	Belanja Modal
1	Prov. Aceh	20.906.506.241.212	2.407.479.412.537
2	Prov. Sumatera Utara	16.465.581.739.483	1.145.972.228.647
3	Prov. Sumatera Barat	9.763.903.046.956	785.887.923.556
4	Prov. Riau	29.935.125.050.403	623.644.302.765
5	Prov. Jambi	8.517.755.697.517	818.059.263.041
6	Prov. Sumatera Selatan	11.844.599.755.104	733.382.314.936
7	Prov. Bengkulu	2.794.222.957.691	305.053.538.410
8	Prov. Lampung	6.109.073.617.493	925.454.683.174
9	Prov. DKI Jakarta	425.756.995.051.083	10.411.118.390.249
10	Prov. Jawa Barat	28.614.139.178.798	1.359.802.615.163
11	Prov. Jawa Tengah	25.057.414.797.938	1.570.679.410.770
12	Prov. DI Yogyakarta	7.085.704.720.675	442.446.473.601
13	Prov. Jawa Timur	25.914.348.383.925	1.207.456.633.374

Tabel 4.3 (Lanjutan)
Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2014
(dalam satuan rupiah)

14	Prov. Kalimantan Barat	5.626.886.849.281	490.219.404.243
15	Prov. Kalimantan Tengah	10.237.049.599.817	814.507.823.610
16	Prov. Kalimantan Selatan	10.728.332.295.263	1.266.883.988.515
17	Prov. Kalimantan Timur	30.089.700.173.299	2.211.317.315.471
18	Prov. Sulawesi Utara	4.576.695.729.099	506.723.317.942
19	Prov. Sulawesi Tengah	4.914.468.007.761	276.831.808.150
20	Prov. Sulawesi Selatan	7.945.615.814.350	676.237.209.051
21	Prov. Sulawesi Tenggara	7.383.457.550.987	553.493.129.799
22	Prov. Bali	6.413.739.380.986	370.585.304.612
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	11.963.681.039.485	422.797.430.140
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	6.228.497.977.950	407.600.788.970
25	Prov. Maluku	5.142.900.347.645	369.329.906.335
26	Prov. Papua	21.463.852.247.807	1.689.302.792.613
27	Prov. Maluku Utara	1.968.264.197.174	427.964.702.584
28	Prov. Banten	12.535.341.575.829	691.484.342.957
29	Prov. Bangka Belitung	4.358.687.025.015	305.553.488.954
30	Prov. Gorontalo	2.028.958.052.928	232.424.743.197
31	Prov. Kepulauan Riau	4.665.884.534.180	717.994.481.279
32	Prov. Papua Barat	10.130.351.024.696	1.191.788.081.842
33	Prov. Sulawesi Barat	1.344.418.195.971	267.018.262.350
34	Prov. Kalimantan Utara	1.455.465.437.049	224.639.157.630

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.3 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset yang diterima Provinsi selama Tahun 2014. Jumlah belanja modal dan total aset tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal Rp. 10.411.118.390.249 dan jumlah total aset Rp. 425.756.995.051.083 . Jumlah belanja modal terendah dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah Rp. 224.639.157.630 dan total aset terendah dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah Rp. 1.344.418.195.971 .

Tabel 4.4
PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2015
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	Daper
1	Prov. Aceh	1.972.049.032.902	1.561.778.472.543
2	Prov. Sumatera Utara	4.883.880.619.308	1.521.253.168.298
3	Prov. Sumatera Barat	1.876.733.122.796	1.390.876.415.377
4	Prov. Riau	3.476.960.097.649	2.548.627.473.189
5	Prov. Jambi	1.241.223.028.012	1.419.079.798.364
6	Prov. Sumatera Selatan	2.534.526.413.315	2.329.728.331.330
7	Prov. Bengkulu	701.300.383.229	1.208.985.365.208
8	Prov. Lampung	2.247.342.667.611	1.514.291.528.636
9	Prov. DKI Jakarta	33.686.176.815.708	5.887.267.644.697
10	Prov. Jawa Barat	16.032.856.414.345	2.506.877.511.840
11	Prov. Jawa Tengah	10.904.825.812.504	2.257.142.994.740
12	Prov. DI Yogyakarta	1.593.110.769.595	1.021.886.268.197
13	Prov. Jawa Timur	15.402.647.674.503	3.115.619.118.152
14	Prov. Kalimantan Barat	1.702.542.350.065	1.644.655.327.863
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.174.969.266.557	1.673.376.686.956
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.684.908.313.881	1.576.111.339.450
17	Prov. Kalimantan Timur	4.950.160.613.906	4.024.025.055.410
18	Prov. Sulawesi Utara	1.012.945.961.386	1.173.041.386.645
19	Prov. Sulawesi Tengah	904.937.124.509	1.557.754.565.164
20	Prov. Sulawesi Selatan	3.270.828.511.467	1.590.754.389.411
21	Prov. Sulawesi Tenggara	667.079.209.826	1.383.850.899.555
22	Prov. Bali	3.041.298.422.525	1.070.197.147.350
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.372.661.567.125	1.450.695.264.778
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	882.315.240.378	1.461.922.422.707
25	Prov. Maluku	390.813.371.781	1.453.149.900.103
26	Prov. Papua	912.908.312.259	3.256.235.609.860
27	Prov. Maluku Utara	236.054.304.107	1.303.829.596.014
28	Prov. Banten	4.972.737.619.281	976.787.585.900
29	Prov. Bangka Belitung	571.802.890.055	1.130.400.495.449
30	Prov. Gorontalo	289.557.151.142	934.046.394.149
31	Prov. Kepulauan Riau	1.013.226.321.364	1.246.121.773.175
32	Prov. Papua Barat	322.799.297.752	2.496.263.896.072
33	Prov. Sulawesi Barat	273.507.239.233	991.630.605.275
34	Prov. Kalimantan Utara	370.047.613.759	910.439.345.079

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.4 menggambarkan jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang diterima Provinsi selama Tahun 2015. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD Rp. 33.686.176.815.708 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 5.887.267.644.697. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Maluku Utara dengan jumlah PAD Rp. 236.054.304.107. Jumlah Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah Rp. 800.313.828.654. Terdapat 17 Provinsi yang mampu menghasilkan jumlah PAD lebih tinggi dari pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. Masih terdapat 17 Provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan jumlah Dana Perimbangannya. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2015 jumlah daerah yang memiliki PAD lebih tinggi disbanding dana perimbangan sebanding dengan daerah yang memiliki PAD lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima.

Tabel 4.5
Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2015
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	Total Aset	Belanja Modal
1	Prov. Aceh	16.128.417.420.379	2.025.103.488.978
2	Prov. Sumatera Utara	12.307.648.066.987	932.244.349.249
3	Prov. Sumatera Barat	7.168.026.165.850	788.149.955.543
4	Prov. Riau	26.046.927.414.246	2.014.487.685.482
5	Prov. Jambi	5.390.176.322.974	791.487.340.375
6	Prov. Sumatera Selatan	13.760.363.152.959	1.041.021.930.768
7	Prov. Bengkulu	3.191.506.117.380	479.181.286.107
8	Prov. Lampung	4.328.153.194.287	868.999.195.460
9	Prov. DKI Jakarta	421.061.389.203.531	10.244.016.709.208
10	Prov. Jawa Barat	25.574.494.189.275	2.298.676.125.205
11	Prov. Jawa Tengah	23.671.833.181.231	2.514.681.555.008

Tabel 4.5 (Lanjutan)
Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2015
(dalam satuan rupiah)

12	Prov. DI Yogyakarta	5.313.019.451.168	627.602.185.565
13	Prov. Jawa Timur	26.958.068.256.119	2.258.320.071.662
14	Prov. Kalimantan Barat	6.913.584.525.008	368.542.206.899
15	Prov. Kalimantan Tengah	8.884.606.823.879	959.141.543.370
16	Prov. Kalimantan Selatan	10.116.946.834.569	1.221.732.391.058
17	Prov. Kalimantan Timur	23.428.575.292.236	2.007.130.809.496
18	Prov. Sulawesi Utara	4.829.525.823.823	757.277.044.717
19	Prov. Sulawesi Tengah	3.750.216.984.210	442.524.325.052
20	Prov. Sulawesi Selatan	8.146.167.988.935	849.305.057.556
21	Prov. Sulawesi Tenggara	7.545.880.421.394	683.508.524.457
22	Prov. Bali	5.616.048.443.600	562.235.633.012
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	10.918.318.404.273	834.584.079.149
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	4.485.512.908.015	606.702.214.577
25	Prov. Maluku	4.148.811.786.282	542.785.444.495
26	Prov. Papua	16.090.766.721.646	2.865.461.762.743
27	Prov. Maluku Utara	2.258.733.559.619	423.492.341.205
28	Prov. Banten	10.136.346.846.015	1.435.969.706.844
29	Prov. Bangka Belitung	3.391.450.064.906	233.717.853.658
30	Prov. Gorontalo	1.562.126.692.223	344.244.075.019
31	Prov. Kepulauan Riau	3.865.362.032.175	341.284.894.457
32	Prov. Papua Barat	7.894.905.303.026	1.677.004.074.167
33	Prov. Sulawesi Barat	1.565.282.539.830	445.228.018.490
34	Prov. Kalimantan Utara	1.807.408.029.500	668.609.685.103

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.5 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset yang diterima Provinsi selama Tahun 2015. Jumlah belanja modal dan total aset tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal Rp. 10.244.016.709.208 dan jumlah total aset Rp. 421.061.389.203.531. Jumlah belanja modal terendah dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah belanja modal Rp. 344.244.075.019 dan total aset terendah dimiliki oleh Provinsi Bangka Belitung dengan total aset Rp. 1.562.126.692.223.

Tabel 4.6
PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Tahun 2016
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	Daper
1	Prov. Aceh	2.060.180.945.551	1.572.466.631.620
2	Prov. Sumatera Utara	4.954.833.100.869	5.219.273.756.069
3	Prov. Sumatera Barat	1.964.148.975.799	2.576.754.985.110
4	Prov. Riau	3.110.656.139.757	3.824.481.733.335
5	Prov. Jambi	1.233.514.664.110	1.547.888.628.151
6	Prov. Sumatera Selatan	2.546.177.544.349	2.506.312.481.085
7	Prov. Bengkulu	731.556.734.070	1.616.462.129.843
8	Prov. Lampung	2.368.796.251.247	3.158.712.900.538
9	Prov. DKI Jakarta	36.888.017.587.716	15.271.661.452.714
10	Prov. Jawa Barat	17.042.895.113.672	10.622.671.443.683
11	Prov. Jawa Tengah	11.541.029.720.310	8.017.297.595.983
12	Prov. DI Yogyakarta	1.673.749.196.522	1.697.108.535.480
13	Prov. Jawa Timur	15.817.795.024.797	9.039.003.358.881
14	Prov. Kalimantan Barat	1.664.338.991.973	1.860.789.737.696
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.158.303.928.014	1.878.977.521.255
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.499.862.900.404	2.677.349.255.301
17	Prov. Kalimantan Timur	4.029.364.843.886	3.941.626.961.365
18	Prov. Sulawesi Utara	981.044.559.607	1.880.906.286.799
19	Prov. Sulawesi Tengah	939.092.069.082	2.210.604.520.193
20	Prov. Sulawesi Selatan	3.449.561.308.105	3.699.816.673.661
21	Prov. Sulawesi Tenggara	753.657.954.464	2.037.098.801.791
22	Prov. Bali	3.041.195.258.456	1.867.010.930.284
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.359.844.019.438	2.583.032.589.905
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	995.186.120.952	2.839.657.758.567
25	Prov. Maluku	466.208.198.074	2.041.954.997.675
26	Prov. Papua	1.019.732.912.606	3.595.089.073.914
27	Prov. Maluku Utara	280.150.113.343	1.453.204.504.116
28	Prov. Banten	5.463.156.734.851	3.185.553.940.739
29	Prov. Bangka Belitung	574.258.443.820	1.126.284.913.345
30	Prov. Gorontalo	311.223.202.412	1.232.492.163.694
31	Prov. Kepulauan Riau	1.079.309.741.999	1.464.904.579.643
32	Prov. Papua Barat	338.811.109.229	3.221.910.435.351
33	Prov. Sulawesi Barat	277.686.126.682	1.364.157.113.820
34	Prov. Kalimantan Utara	507.955.516.972	1.579.537.873.785

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.6 menggambarkan tentang jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang diterima Provinsi selama Tahun 2016. Jumlah PAD dan Dana Perimbangan tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah PAD Rp. 36.888.017.587.716 dan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 15.271.661.452.714. Jumlah PAD terendah dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah Rp. 277.686.126.682. Jumlah Dana Perimbangan terendah diperoleh oleh Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah Dana Perimbangan senilai Rp. 1.126.284.913.345. Terdapat 8 Provinsi yang mampu menghasilkan jumlah PAD lebih tinggi dari pada jumlah Dana Perimbangan yang diperoleh. Masih terdapat 26 Provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih rendah dibandingkan jumlah Dana Perimbangannya. Jumlah ini mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2014 dan 2015. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak provinsi yang bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2015 menuju tahun 2016.

Tabel 4.7
Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2016
(dalam satuan rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	Total Aset	Belanja Modal
1	Prov. Aceh	18.911.685.653.620	2.284.852.301.265
2	Prov. Sumatera Utara	14.152.149.422.268	1.019.855.142.610
3	Prov. Sumatera Barat	8.152.807.500.452	989.929.771.429
4	Prov. Riau	31.643.508.312.589	2.035.635.833.790
5	Prov. Jambi	6.230.703.051.278	945.539.006.404
6	Prov. Sumatera Selatan	15.278.308.894.172	607.740.926.745
7	Prov. Bengkulu	3.902.701.234.736	385.967.859.173
8	Prov. Lampung	4.883.232.964.194	1.005.779.805.183
9	Prov. DKI Jakarta	442.977.223.000.927	8.965.470.014.533
10	Prov. Jawa Barat	28.286.541.521.361	2.859.355.623.561
11	Prov. Jawa Tengah	30.749.242.076.898	2.815.678.180.450

Belanja Modal dan Total Aset Provinsi Tahun 2016

(dalam satuan rupiah)

12	Prov. DI Yogyakarta	6.050.819.887.074	836.873.712.179
13	Prov. Jawa Timur	30.127.166.768.665	2.150.594.111.043
14	Prov. Kalimantan Barat	7.593.574.406.129	474.804.656.556
15	Prov. Kalimantan Tengah	9.588.975.812.764	783.864.792.770
16	Prov. Kalimantan Selatan	11.138.742.854.862	1.348.729.961.206
17	Prov. Kalimantan Timur	23.113.184.392.170	1.571.814.627.288
18	Prov. Sulawesi Utara	6.150.958.263.759	745.899.590.321
19	Prov. Sulawesi Tengah	4.211.734.102.129	503.973.009.626
20	Prov. Sulawesi Selatan	9.137.116.284.120	856.863.743.969
21	Prov. Sulawesi Tenggara	8.189.043.983.872	751.917.122.616
22	Prov. Bali	8.554.849.314.154	730.924.237.375
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	11.890.842.470.329	696.681.645.258
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	5.354.336.886.083	602.299.044.635
25	Prov. Maluku	4.672.543.530.526	753.758.990.734
26	Prov. Papua	19.128.988.032.431	2.490.333.441.810
27	Prov. Maluku Utara	2.873.883.233.063	592.691.071.221
28	Prov. Banten	10.034.979.988.831	1.334.133.583.359
29	Prov. Bangka Belitung	3.776.442.444.257	229.776.980.689
30	Prov. Gorontalo	1.725.280.421.554	296.922.957.084
31	Prov. Kepulauan Riau	3.872.940.317.954	303.204.145.183
32	Prov. Papua Barat	9.030.570.639.652	1.446.543.651.937
33	Prov. Sulawesi Barat	1.899.310.955.012	498.735.452.856
34	Prov. Kalimantan Utara	3.085.669.426.622	797.282.256.449

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.7 menggambarkan tentang jumlah belanja modal dan total aset yang diterima Provinsi selama Tahun 2016. Jumlah belanja modal dan total aset tertinggi dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah belanja modal Rp. 8.965.470.014.533 dan jumlah total aset Rp. 442.977.223.000.927. Jumlah belanja modal terendah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo dengan jumlah belanja modal Rp. 296.922.957.084 dan total aset terendah dihasilkan oleh Provinsi Bangka Belitung dengan total aset Rp 229.776.980.689 .

4.1.2 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan program SPSS sebagai alat uji. Analisis deskriptif dilakukan untuk menghasilkan ringkasan atau resume data secara umum yang berguna untuk melakukan pengecekan atau validasi data. Sebelum melakukan analisis data, kita harus menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan data jumlah anggaran pendapatan, anggaran PAD, anggaran pengeluaran, total aset, pendapatan, PAD, dana perimbangan, belanja modal, pembiayaan, pinjaman daerah dan obligasi serta pengeluaran daerah. Data-data tersebut diperoleh dari Ringkasan APBD, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dari masing-masing provinsi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tabel 4.8
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	102	.012	36.888	3.74666	6.533795
DAU	102	.000	2.502	1.05832	.435656
DAK	102	.000	7.596	.49154	1.148161
Belanja Modal	102	.225	10.411	1.24235	1.656617
Total Aset	102	1.344	442.977	22.88818	71.703508
Rasio Kemandirian	102	.960	639.550	127.86098	132.258027
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

Dari tabel analisis deskriptif di atas, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata PAD yang diterima selama kurun waktu 3 tahun adalah Rp 3,75 triliun. Rata-rata DAU yang diperoleh Rp 1,06 triliun. Rata-rata DAK adalah Rp 0,49 triliun. Rata-rata belanja modal adalah Rp 1.24 triliun serta rata-rata ukuran pemerintah daerah provinsi di Indonesia selama 2014-2016 memiliki total aset Rp 22,8 triliun.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal ataupun mendekati distribusi normal (Santoso, 2015). Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas bisa menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikan lebih dari 0,05; maka berarti berdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05; maka berarti tidak berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi rasio kemandirian.

Tabel 4.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97493339
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.052
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.529
Asymp. Sig. (2-tailed)		.942

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah 0,942 yaitu lebih dari 0,05. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah data yang diuji berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak dalam model regresi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki hubungan antara variabel bebasnya. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10; maka tidak terdapat hubungan antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Namun, jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10; maka terdapat hubungan antara variabel bebas atau terjadi multikolinearitas terhadap. Selain itu, kita juga harus melihat nilai VIF. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 dan terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00.

Tabel 4.10
Uji Multokolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.940	1.064
	DAU	.908	1.102
	DAK	.941	1.062
	Belanja Modal	.935	1.070
	Total Aset	.969	1.032

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

Sumber: Hasil output SPSS,2018

Nilai *tolerance* dari PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari PAD, DAU, DAK, belanja modal dan total aset

lebih kecil dari 10,00. Hasil tersebut menandakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji yang berarti penelitian dapat dilanjutkan.

4.1.3.3 Uji Heterokedasitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variancedari* nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedasitas karena bila ada gejala tersebut, maka akan terjadi keraguan atau ketidak akuratan pada hasil analisis regresi yang dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji ini. Penelitian ini melakukan uji heterokedasitas dengan melakukan Uji Glejser.

Tabel 4.11
Uji Heterokedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.764	.062		12.284	.000
	PAD	.068861	.070	.102	.985	.327
	DAU	-.108219	.082	-.138	-1.325	.188
	DAK	-.167107	.092	-.185	-1.815	.073
	Belanja Modal	-.003222	.077	-.004	-.042	.967
	Total Aset	-.000007	.001	-.001	-.008	.994

a. Dependent Variable: ABSRESID

Sumber: Hasil output SPSS,2018

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari PAD adalah 0,327; DAU adalah 0,188 DAK adalah 0,073; belanja modal adalah 0,967 dan total aset adalah 0,994. Nilai signifikan dari kelima variabel menunjukkan hasil lebih dari

0,05. Hasil yang dapat disimpulkan adalah tidak terjadi gejala heterokedasitas pada data yang diuji.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW) adalah uji yang digunakan dalam pengujian autokorelasi ini. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis hasil uji ini. Terdapat autokorelasi pada data yang diuji apabila nilai Durbin-Watson kurang dari -2 dan lebih dari 2 begitupun sebaliknya. Apabila nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan 2 maka tidak terjadi autokorelasi pada data yang diuji.

Tabel 4.12
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.343 ^a

a. Predictors: (Constant), Total Aset, PAD, DAK, Belanja Modal, DAU

b. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai DW 1,343. Nilai tersebut lebih dari -2 dan kurang dari 2 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data yang diuji sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

4.1.3.5 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi menurut Gujarat (2006) dalam Arifin (2017) adalah kajian untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Terdapat uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Uji regresi sederhana untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat (Y) dengan satu variabel bebas (X). Sedangkan Uji regresi berganda atau regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas (Arifin, 2017). Berikut hasil dari Uji Regresi Linear Berganda variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan rasio kemandirian.

Tabel 4.13

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	73.000	17.014		4.291	.000
	PAD	36.422	2.045	1.799	17.812	.000
	DAU	-16.574	15.354	-.055	-1.079	.283
	DAK	-62.439	5.780	-.542	-10.802	.000
	Belanja Modal	18.694	11.643	.234	1.606	.112
	Total Aset	-2.473	.283	-1.340	-8.736	.000

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

$$Y = 73,000 + 36,422X_1 - 16,574X_2 - 62,439X_3 + 18,693X_4 - 2,473X_5 + e$$

Hasil interpretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut.

- a) Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah

b) $a = 73,000$

Koefisien ini menandakan bahwa apabila tidak terdapat variabel bebas (PAD, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah), maka nilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 73,000. Artinya, kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 73% sebelum atau tanpa adanya variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah (X_1, X_2, X_3, X_4 dan $X_5=0$).

c) $b_1 = 36,422$

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel PAD meningkat 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 36,422% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0.

d) $b_2 = -16,574$

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel DAU meningkat sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 16,574% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0.

e) $b_3 = -62,439$

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel DAK meningkat sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 62,439% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0.

f) $b_4 = 18,693$

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel belanja modal yang diproksikan meningkat sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 18,693% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0.

g) $b_5 = -2,473$

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap variabel ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset yang diproksikan meningkat sebesar 1 triliun rupiah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 2,473% dengan asumsi variabel bebas yang lain sama dengan 0.

4.1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan pengujian terhadap kebenaran dari suatu pernyataan dalam bentuk statistik dan akan menghasilkan kesimpulan untuk menolak atau menerima pernyataan tersebut. Hipotesis merupakan pernyataan yang diharapkan terjadi pada hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Arifin, 2017). Berikut hasil dari Uji hipotesis variabel PAD, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi rasio efektivitas.

4.1.4.1 Uji t (Parsial)

Uji t atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Langkah pertama kita harus membuat

pernyataan atau hipotesis. Setelah mengetahui hasilnya, kita harus memperhatikan nilai t hitung, t tabel dan nilai signifikannya dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 3) Jika nilai sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 4) Jika nilai sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji t yang harus dilakukan sesuai dengan jumlah hipotesis penelitian ini yaitu sebanyak 5 uji t . Uji t pertama dilakukan untuk menguji H_1 yaitu PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% maka nilai $\alpha = 0,05$. Rumus untuk mencari t tabel yaitu tingkat kepercayaan :2 ; jumlah data – jumlah variabel – 1 atau t tabel = $(\alpha/2; n-k-1)$. Perhitungan t tabel $(0,025; 76)$ menghasilkan nilai 1,988. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perhitungan tersebut adalah t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = 17,812 dan nilai signifikan. $0,000 < 0,05$; maka PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji t yang kedua yaitu uji t terhadap $H_2 = \text{DAU (X2)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan nilai t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -1,079 dan nilai

signifikan $0,283 > 0,05$ maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji t yang ketiga yaitu uji t terhadap $H_3 = \text{DAK (X3)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -10,802 dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$; maka DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji t yang keempat yaitu uji t terhadap $H_4 = \text{Belanja Modal (X2)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = 1,606 dan nilai signifikan $0,112 > 0,05$ maka belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji t yang kelima yaitu uji t terhadap $H_5 = \text{Total Aset (X5)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = -2,473 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.1.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara bersamaan. Pengujian hipotesis diketahui melalui perbandingan F hitung dengan F tabel yang dihitung dengan $\alpha = 0,05$. Hipotesis

yang digunakan adalah sebagai berikut. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka Variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Namun, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka Variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Pengujian dilakukan terhadap $H_0 =$ Variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan $H_1 =$ Variabel X_1, X_2, X_3 dan X_4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Berikut adalah hasil uji F yang telah di hasilkan pada program SPSS .

Tabel 4.14
Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	318650.4	4	79662.595	7.427	.000 ^a
	Residual	815170.8	76	10725.932		
	Total	1133821	80			

a. Predictors: (Constant), Total Aset, Daper, PAD, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan PD

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 7,427. Sedangkan F_{tabel} dapat dihitung melalui Ms. Exel dan hasilnya adalah $F_{tabel} = 2,309$. Hasilnya $F_{hitung} = 7,427 > F_{tabel} = 2,309$; maka variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y .

4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.816	56.749605

a. Predictors: (Constant), Total Aset, DAK, DAU, PAD, Belanja Modal

Sumber: Hasil output SPSS, 2018

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa R^2 sebesar 0,825 atau 82,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa keragaman variabel kinerja keuangan pemerintah daerah 82,5% dipengaruhi oleh variabel bebas PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Parsial PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

4.2.1.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa t tabel (0,025; 76) menghasilkan nilai 1.988. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perhitungan tersebut adalah t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = 17,812 dan

nilai signifikan. $0,000 < 0,05$; maka PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jauhar (2016) yang mana menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Masdiantini dan Erawati (2016) pada kabupaten/ kota di Bali menyatakan bahwa kemakmuran yang diprosikan dengan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat diterima sesuai dengan hakikat PAD itu sendiri yang merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa PAD merupakan gambaran dari kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah yang mereka miliki. Apabila manajemen pengelolaan potensi suatu daerah itu baik, maka akan menghasilkan PAD yang tinggi. PAD yang tinggi akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semakin baik karena mereka tidak bergantung lagi pada transfer dari pemerintah. Hal ini akan berujung pada kinerja keuangan yang semakin baik karena mereka memiliki kemandirian keuangan yang baik.

4.2.1.2 Pengaruh DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Hasil uji regresi DAU menghasilkan nilai t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -1,079 dan nilai signifikan $0,283 > 0,05$ maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Kusuma (2017) dan Jauhar (2016) yang menyatakan bahwa

DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dana bagi pemerintah daerah untuk menunjang jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta menghindari ketimpangan fiskal pada setiap daerah. Namun, DAU yang diberikan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan dana transfer pusat sehingga pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat akan memberikan kesempatan pada oknum-oknum tertentu yang dapat melakukan penyelewengan demi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.2.1.3 Pengaruh DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Hasil uji regresi terhadap DAK menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -10,802 dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$; maka DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jauhar (2016) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Abdullah dkk. (2015) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini dapat diterima karena DAK merupakan dana yang diberikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran yang diutamakan demi kepentingan nasional. Sasaran utama dana ini yaitu untuk daerah perbatasan dan terpencil. Hal ini tentunya berbeda dengan DAU yang diberikan kepada semua daerah guna pemerataan secara umum dengan besar alokasi yang telah ditentukan. Sedangkan DAK ditujukan untuk daerah-daerah tertentu yang membutuhkan bantuan khusus dalam bidang tertentu. Semakin banyak DAK yang diterima oleh suatu daerah menandakan bahwa kemandirian keuangan daerah tersebut semakin rendah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin buruk.

4.2.1.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan hasil uji regresi menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = 1,606 dan nilai signifikan $0,112 > 0,05$ maka belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bertolak belakang dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bisa diterima sesuai dengan pernyataan Boediarso Teguh Widodo Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diliput oleh Detik Finance pada tanggal 22 November 2017. Beliau menyatakan bahwa jumlah belanja pegawai yang lebih besar dari belanja modal serta lambatnya realisasi belanja modal menjadi salah satu penyebab tidak efisien dan efektivitasnya pengelolaan anggaran. Pernyataan tersebut menggambarkan pengelolaan belanja modal oleh pemerintah daerah masih kurang optimal. Belanja modal yang dilakukan belum mencapai manfaat yang seharusnya dapat membantu jalannya pemerintahan dan memaksimalkan penyediaan infrastruktur untuk pelayanan masyarakat. Hal ini juga dapat disebabkan kurangnya pengawasan serta kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dalam merealisasikan belanja modal yang seharusnya bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jika pengelolaan terhadap belanja modal tidak diperbaiki, maka seberapapun besar belanja modal tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

4.2.1.5 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = -2,473 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa total aset tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Aziz (2016) menyatakan bahwa total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar total aset semakin besar tuntutan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hal sebaliknya akan terjadi apabila pengelolaan aset tidak dilakukan dengan baik. Pengelolaan aset yang baik akan memberikan manfaat yaitu efisiensi atas anggaran yang telah ditetapkan dan meningkatkan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset yang bersangkutan (Lukito, 2017). Hanis, dkk (2011) dalam Lukito (2017) mengemukakan beberapa faktor yang dapat menghambat pengelolaan aset daerah seperti: (1) Kerangka kebijakan yang belum komprehensif; (2) Pemikiran tradisional yang tidak mengutamakan pemanfaatan aset publik untuk meningkatkan pemasukan daerah; (3) Inefisiensi; (4) Keterbatasan data; dan (5) Keterbatasan sumber daya manusia. Selain masalah tersebut, terdapat beberapa fakta yang telah dipaparkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Semester I & II tahun 2015 serta Semester I tahun 2016 mengenai kendala

dan permasalahan manajemen aset pemerintah daerah antara lain: (1) Pencatatan aset tidak akurat maupun belum dilakukan; (2) Aset tidak memiliki data yang andal; (3) Penyusunan laporan tidak sesuai standar atau aturan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilitized*); (5) Belum adanya penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur); (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lukito, 2017). Selain masalah tersebut, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang dialami pemerintah daerah dalam pelaporan aset terkait dengan beberapa hal. Pertama, kepemilikan aset yang tidak pasti dikarenakan ketidakjelasan status kepemilikan serta tidak adanya bukti kepemilikan yang sah. Kedua, manfaat ekonomi aset di masa depan yang tidak pasti dan sulit diukur. Ketiga, terjadinya perubahan nilai aset dikarenakan nilai aset yang dicatat menggunakan nilai historis sedangkan nilai pasar selalu mengalami berubah. Kendala dan masalah-masalah diatas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

4.2.2 Pengaruh Simultan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan tabel uji F, dapat diketahui bahwa $F_{hitung} = 7,427 > F_{tabel} = 2,292$; maka variabel X_1, X_2, X_3, X_4 dan X_5 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kelima variabel tersebut harus dijalankan secara bersama untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena mereka saling memiliki keterkaitan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Uji t pertama dilakukan untuk menguji $H_1 = \text{PAD (X1)}$ berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hasil uji diperoleh t tabel = 1,995 lebih besar dari t hitung = 1,059 dan nilai signifikan. $0,293 > 0,05$; maka PAD secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
- 2) Uji t yang kedua yaitu uji t terhadap $H_2 = \text{DAU (X2)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan nilai t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -1,079 dan nilai signifikan $0,283 > 0,05$ maka DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
- 3) Uji t yang ketiga yaitu uji t terhadap $H_3 = \text{DAK (X3)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = -10,802 dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$; maka DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

- 4) Uji t yang keempat yaitu uji t terhadap $H_4 = \text{Belanja Modal (X2)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih besar dari t hitung = 1,606 dan nilai signifikan $0,112 > 0,05$ maka belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 5) Uji t yang kelima yaitu uji t terhadap $H_5 = \text{Total Aset (X5)}$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Pengujian menghasilkan t tabel = 1,988 lebih kecil dari t hitung = -2,473 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 6) Uji F dilakukan dengan nilai F hitung adalah 7,427. Sedangkan F tabel dapat dihitung melalui Ms. Exel dan hasilnya adalah F tabel = 2,309. Hasilnya F hitung = $7,427 > F \text{ tabel} = 2,309$; .maka variabel PAD, DAU, DAK, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah secara simultan atau bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan cakupan penelitian serta menambah lebih banyak sampel dengan rentang tahun yang lebih panjang agar dapat menghasilkan data yang lebih signifikan.
- 2) Saran untuk pihak Pemerintah agar dapat mengelola dana perimbangan dengan baik sehingga bisa lebih meningkatkan kinerja keuangan serta mencari solusi atas segala hal yang menjadi penghalang atau kendala dari faktor yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah seperti PAD, belanja modal serta aset yang dimiliki tiap daerah agar dapat dikelola secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Al-Hadits dan terjemahannya

- Abdullah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*, 3(1), 41-67
- Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arwati. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 364-369
- Arifin, Johar. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Armaja, dkk. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/ Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168-181
- Aziz, Asmaul. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur). *EKSIS*, 11(1), 86-101
- Deni, Darmawan. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2016). *Dana Alokasi Khusus*. Jakarta. Diperoleh tanggal 29 januari 2018 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1771>
- Enterprise, Jubelee. (2014). *SPSS untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit UNDIP
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jauhar, Fauzan. (2016). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se**

- Sumatera Barat**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Kusuma, Aulia Riska., Handayani, Nur. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(1),403-420.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Masdiantini, Putu Riesty dan Erawati, Ni Made. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lukito, Jose. (27 Februari 2017). *Identifikasi masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil pemeriksaan BPK*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diperoleh pada tanggal 20 Juni 2017 dari <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12534/Identifikasi-Masalah-Aset-Berdasarkan-Riset-dan-Hasil-Pemeriksaan-BPK.html>
- Mulyani, Sri., Wibowo, Hardiyanto. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57-66
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 26 ayat 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- Prastiwi, Ayu., Nurlalela, Siti., & Chomsatu, Yuli. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO 2016*. Universitas Islam Batik Surakarta. Hal. 872-879
- Putry, Nur Anita Chandra., Badrudin, Rudy. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB*, 12(1), 25-34
- Sari, Indah Puspa. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679-692

Santoso, Singgih. (2017). *Statistik Multivariat dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Simorangkir, Eduardo. (22 November 2017). *Kemenkeu: Pengelolaan Anggaran di daerah Belum Efektif*. Detik Finance. Diperoleh tanggal 20 Juni 2018 dari <https://googleweblight.com/i?u=https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3737927/kemenkeu-pengelolaan-anggaran-di-daerah-belum-efektif&hl=id-ID>

Soemantri, Sri. (2014). *Otonomi Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sukma, Yoga. (13 April 2017). *Sri Mulyani Ubah Ketentuan Penyaluran Dana Transfer Daerah*. Kompas. Diperoleh tanggal 23 April 2018 dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/04013/222155826/sri-mulyani.ubah.ketentuan.penyaluran.dana.transfer.daerah.#page1>

Sumarjo, Hendro. (2010). **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**, *Skripsi*.

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000

Yusuf, Muri. (2014). *Meode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. fajar Interpratama Mandiri.

PAD PROVINSI TAHUN 2014-2016

NO	NAMA PROVINSI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Prov. Aceh	1.731.130.839.637	1.972.049.032.902	2.060.180.945.550
2	Prov. Sumatera Utara	4.416.811.865.267	4.883.880.619.308	4.954.833.100.869
3	Prov. Sumatera Barat	1.729.222.284.040	1.876.733.122.796	1.964.148.975.799
4	Prov. Riau	3.245.087.745.090	3.476.960.097.649	3.110.656.139.757
5	Prov. Jambi	1.281.239.472.808	1.241.223.028.012	1.233.514.664.110
6	Prov. Sumatera Selatan	2.422.673.788.769	2.534.526.413.315	2.546.177.544.349
7	Prov. Bengkulu	672.064.468.249	701.300.383.229	731.556.734.070
8	Prov. Lampung	2.274.685.572.913	2.247.342.667.611	2.368.796.251.247
9	Prov. DKI Jakarta	31.274.215.885.720	33.686.176.815.708	36.888.017.587.716
10	Prov. Jawa Barat	15.038.153.309.919	16.032.856.414.345	17.042.895.113.672
11	Prov. Jawa Tengah	9.916.358.231.432	10.904.825.812.504	11.541.029.720.310
12	Prov. DI Yogyakarta	1.464.604.954.200	1.593.110.769.595	1.673.749.196.522
13	Prov. Jawa Timur	14.442.216.534.959	15.402.647.674.503	15.817.795.024.797
14	Prov. Kalimantan Barat	1.621.610.890.849	1.702.542.350.065	1.664.338.991.973
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.253.708.122.296	1.174.969.266.557	1.158.303.928.014
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.898.704.954.480	2.684.908.313.881	2.499.862.900.404
17	Prov. Kalimantan Timur	6.663.113.274.491	4.950.160.613.906	4.029.364.843.886
18	Prov. Sulawesi Utara	937.681.926.708	1.012.945.961.386	981.044.559.607
19	Prov. Sulawesi Tengah	824.611.352.385	904.937.124.509	939.092.069.082
20	Prov. Sulawesi Selatan	3.029.122.238.496	3.270.828.511.467	3.449.561.308.105
21	Prov. Sulawesi Tenggara	599.942.751.257	667.079.209.826	753.657.954.464
22	Prov. Bali	2.920.416.697.075	3.041.298.422.525	3.041.195.258.456
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.115.060.397.173	1.372.661.567.125	1.359.844.019.438
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	763.300.806.702	882.315.240.378	995.186.120.952
25	Prov. Maluku	425.425.607.781	390.813.371.781	466.208.198.074
26	Prov. Papua	944.929.691.841	912.908.312.259	1.019.732.912.606
27	Prov. Maluku Utara	203.059.697.910	236.054.304.107	280.150.113.343
28	Prov. Banten	4.899.125.691.766	4.972.737.619.281	5.463.156.734.851
29	Prov. Bangka Belitung	563.108.840.861	571.802.890.055	574.258.443.820
30	Prov. Gorontalo	281.920.210.039	289.557.151.142	311.223.202.412
31	Prov. Kepulauan Riau	1.070.208.288.698	1.013.226.321.364	1.079.309.741.999
32	Prov. Papua Barat	306.674.697.583	322.799.297.752	338.811.109.229
33	Prov. Sulawesi Barat	222.635.496.656	273.507.239.233	277.686.126.682
34	Prov. Kalimantan Utara	11.833.885.267	370.047.613.759	507.955.516.972

DAU PROVINSI TAHUN 2014-2016

NO	NAMA PROVINSI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Prov. Aceh	1.201.612.787.000	1.237.894.986.000	1.263.870.989.000
2	Prov. Sumatera Utara	1.349.132.276.000	1.139.261.371.000	1.604.505.673.000
3	Prov. Sumatera Barat	1.129.886.306.000	1.221.128.606.000	1.261.915.864.000
4	Prov. Riau	820.984.584.000	654.220.250.000	738.378.736.825
5	Prov. Jambi	948.337.712.000	1.009.165.864.000	1.070.452.478.000
6	Prov. Sumatera Selatan	985.542.760.000	931.915.470.000	1.071.421.391.000
7	Prov. Bengkulu	955.095.187.000	1.046.080.820.000	1.070.751.292.000
8	Prov. Lampung	1.136.053.041.000	1.097.129.439.000	1.321.679.032.000
9	Prov. DKI Jakarta	85.985.282.000	-	-
10	Prov. Jawa Barat	1.687.686.386.000	1.303.654.355.000	1.248.112.171.860
11	Prov. Jawa Tengah	1.803.931.189.000	1.629.429.283.000	1.859.907.223.000
12	Prov. DI Yogyakarta	899.923.550.000	920.544.722.000	940.835.434.000
13	Prov. Jawa Timur	1.866.548.185.000	1.587.261.707.000	1.672.878.372.000
14	Prov. Kalimantan Barat	1.290.222.856.000	1.405.594.169.000	1.493.486.253.000
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.152.428.738.000	1.280.595.848.000	1.294.850.243.000
16	Prov. Kalimantan Selatan	701.725.536.000	571.244.699.000	779.517.454.000
17	Prov. Kalimantan Timur	57.312.515.000	-	80.402.179.000
18	Prov. Sulawesi Utara	949.852.622.000	1.026.948.809.000	1.065.545.204.000
19	Prov. Sulawesi Tengah	1.087.885.014.000	1.221.602.865.000	1.272.925.036.000
20	Prov. Sulawesi Selatan	1.209.587.410.000	1.180.010.167.000	1.394.148.361.000
21	Prov. Sulawesi Tenggara	1.053.636.011.000	1.176.423.577.000	1.200.634.199.000
22	Prov. Bali	832.297.473.000	831.597.268.000	850.144.224.000
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	980.390.340.000	1.088.633.717.000	1.117.691.709.000
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.131.687.590.000	1.300.445.875.000	1.337.091.848.000
25	Prov. Maluku	1.019.704.312.000	1.177.774.674.000	1.260.897.986.000
26	Prov. Papua	1.991.202.341.100	2.277.932.698.000	2.502.449.137.000
27	Prov. Maluku Utara	906.623.550.000	1.061.177.950.000	1.132.578.857.000
28	Prov. Banten	728.490.012.000	640.981.003.000	693.738.579.794
29	Prov. Bangka Belitung	806.820.146.000	897.887.443.000	905.526.208.000
30	Prov. Gorontalo	734.279.438.000	845.395.651.000	884.557.753.000
31	Prov. Kepulauan Riau	698.009.318.000	695.943.711.000	866.810.696.000
32	Prov. Papua Barat	1.122.264.659.000	1.284.079.495.000	1.322.765.639.000
33	Prov. Sulawesi Barat	776.214.122.000	895.580.933.000	925.147.622.000
34	Prov. Kalimantan Utara	20.567.986.000	651.247.428.000	1.032.459.159.000

DAK PROVINSI TAHUN 2014-2016

NO	NAMA PROVINSI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Prov. Aceh	72.953.790.000	70.866.056.000	129.982.373.000
2	Prov. Sumatera Utara	59.728.388.000	47.746.880.500	3.103.684.863.460
3	Prov. Sumatera Barat	54.108.200.000	62.731.100.000	1.180.338.806.000
4	Prov. Riau	43.737.510.000	63.362.192.000	1.421.530.289.075
5	Prov. Jambi	49.355.510.000	57.944.770.000	81.644.852.458
6	Prov. Sumatera Selatan	62.754.900.000	69.405.320.000	148.180.327.539
7	Prov. Bengkulu	53.927.020.000	63.893.200.000	468.362.409.500
8	Prov. Lampung	48.851.620.000	245.066.400.000	1.651.557.871.127
9	Prov. DKI Jakarta	-	-	2.883.078.374.200
10	Prov. Jawa Barat	78.215.030.000	18.904.024.000	7.596.342.335.570
11	Prov. Jawa Tengah	79.165.240.000	57.972.640.000	5.263.717.151.065
12	Prov. DI Yogyakarta	37.131.610.000	39.084.040.000	643.207.672.956
13	Prov. Jawa Timur	101.875.970.000	66.039.190.000	5.516.240.624.514
14	Prov. Kalimantan Barat	63.189.480.000	85.584.200.000	199.767.933.990
15	Prov. Kalimantan Tengah	61.929.830.000	72.525.960.000	241.247.658.125
16	Prov. Kalimantan Selatan	54.189.940.000	63.890.470.000	853.323.829.000
17	Prov. Kalimantan Timur	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952
18	Prov. Sulawesi Utara	59.675.060.000	76.744.790.000	712.639.625.179
19	Prov. Sulawesi Tengah	63.942.480.000	250.986.290.000	835.621.352.212
20	Prov. Sulawesi Selatan	72.976.480.000	222.686.392.000	1.991.324.789.475
21	Prov. Sulawesi Tenggara	58.750.010.000	86.399.950.000	738.810.237.719
22	Prov. Bali	41.600.750.000	134.496.571.000	844.872.363.132
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	54.663.430.000	214.257.150.000	1.090.304.456.356
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	74.235.910.000	100.654.710.000	1.411.352.709.000
25	Prov. Maluku	70.134.160.000	216.914.600.000	318.803.857.816
26	Prov. Papua	120.505.640.000	460.303.520.000	328.169.423.000
27	Prov. Maluku Utara	74.623.090.000	146.686.448.000	233.861.504.648
28	Prov. Banten	12.538.478.000	16.789.048.000	1.998.321.331.000
29	Prov. Bangka Belitung	43.372.460.000	44.355.816.000	77.898.689.000
30	Prov. Gorontalo	42.374.060.000	67.883.960.000	319.995.162.651
31	Prov. Kepulauan Riau	41.678.090.000	42.537.210.000	76.384.932.000
32	Prov. Papua Barat	61.215.730.000	92.376.080.000	489.419.916.083
33	Prov. Sulawesi Barat	50.585.710.000	72.513.950.000	410.156.415.529
34	Prov. Kalimantan Utara	8.221.270.000	59.947.820.000	377.594.814.058

BELANJA MODAL PROVINSI TAHUN 2014-2016

NO	NAMA PROVINSI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Prov. Aceh	2.407.479.412.537	2.025.103.488.978	2.284.852.301.265
2	Prov. Sumatera Utara	1.145.972.228.647	932.244.349.249	1.019.855.142.610
3	Prov. Sumatera Barat	785.887.923.556	788.149.955.543	989.929.771.429
4	Prov. Riau	623.644.302.765	2.014.487.685.482	2.035.635.833.790
5	Prov. Jambi	818.059.263.041	791.487.340.375	945.539.006.404
6	Prov. Sumatera Selatan	733.382.314.936	1.041.021.930.768	607.740.926.745
7	Prov. Bengkulu	305.053.538.410	479.181.286.107	385.967.859.173
8	Prov. Lampung	925.454.683.174	868.999.195.460	1.005.779.805.183
9	Prov. DKI Jakarta	10.411.118.390.249	10.244.016.709.208	8.965.470.014.533
10	Prov. Jawa Barat	1.359.802.615.163	2.298.676.125.205	2.859.355.623.561
11	Prov. Jawa Tengah	1.570.679.410.770	2.514.681.555.008	2.815.678.180.450
12	Prov. DI Yogyakarta	442.446.473.601	627.602.185.565	836.873.712.179
13	Prov. Jawa Timur	1.207.456.633.374	2.258.320.071.662	2.150.594.111.043
14	Prov. Kalimantan Barat	490.219.404.243	368.542.206.899	474.804.656.556
15	Prov. Kalimantan Tengah	814.507.823.610	959.141.543.370	783.864.792.770
16	Prov. Kalimantan Selatan	1.266.883.988.515	1.221.732.391.058	1.348.729.961.206
17	Prov. Kalimantan Timur	2.211.317.315.471	2.007.130.809.496	1.571.814.627.288
18	Prov. Sulawesi Utara	506.723.317.942	757.277.044.717	745.899.590.321
19	Prov. Sulawesi Tengah	276.831.808.150	442.524.325.052	503.973.009.626
20	Prov. Sulawesi Selatan	676.237.209.051	849.305.057.556	856.863.743.969
21	Prov. Sulawesi Tenggara	553.493.129.799	683.508.524.457	751.917.122.616
22	Prov. Bali	370.585.304.612	562.235.633.012	730.924.237.375
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	422.797.430.140	834.584.079.149	696.681.645.258
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	407.600.788.970	606.702.214.577	602.299.044.635
25	Prov. Maluku	369.329.906.335	542.785.444.495	753.758.990.734
26	Prov. Papua	1.689.302.792.613	2.865.461.762.743	2.490.333.441.810
27	Prov. Maluku Utara	427.964.702.584	423.492.341.205	592.691.071.221
28	Prov. Banten	691.484.342.957	1.435.969.706.844	1.334.133.583.359
29	Prov. Bangka Belitung	305.553.488.954	233.717.853.658	229.776.980.689
30	Prov. Gorontalo	232.424.743.197	344.244.075.019	296.922.957.084
31	Prov. Kepulauan Riau	717.994.481.279	341.284.894.457	303.204.145.183
32	Prov. Papua Barat	1.191.788.081.842	1.677.004.074.167	1.446.543.651.937
33	Prov. Sulawesi Barat	267.018.262.350	445.228.018.490	498.735.452.856
34	Prov. Kalimantan Utara	224.639.157.630	668.609.685.103	797.282.256.449

TOTAL ASET PROVINSI TAHUN 2014-2016

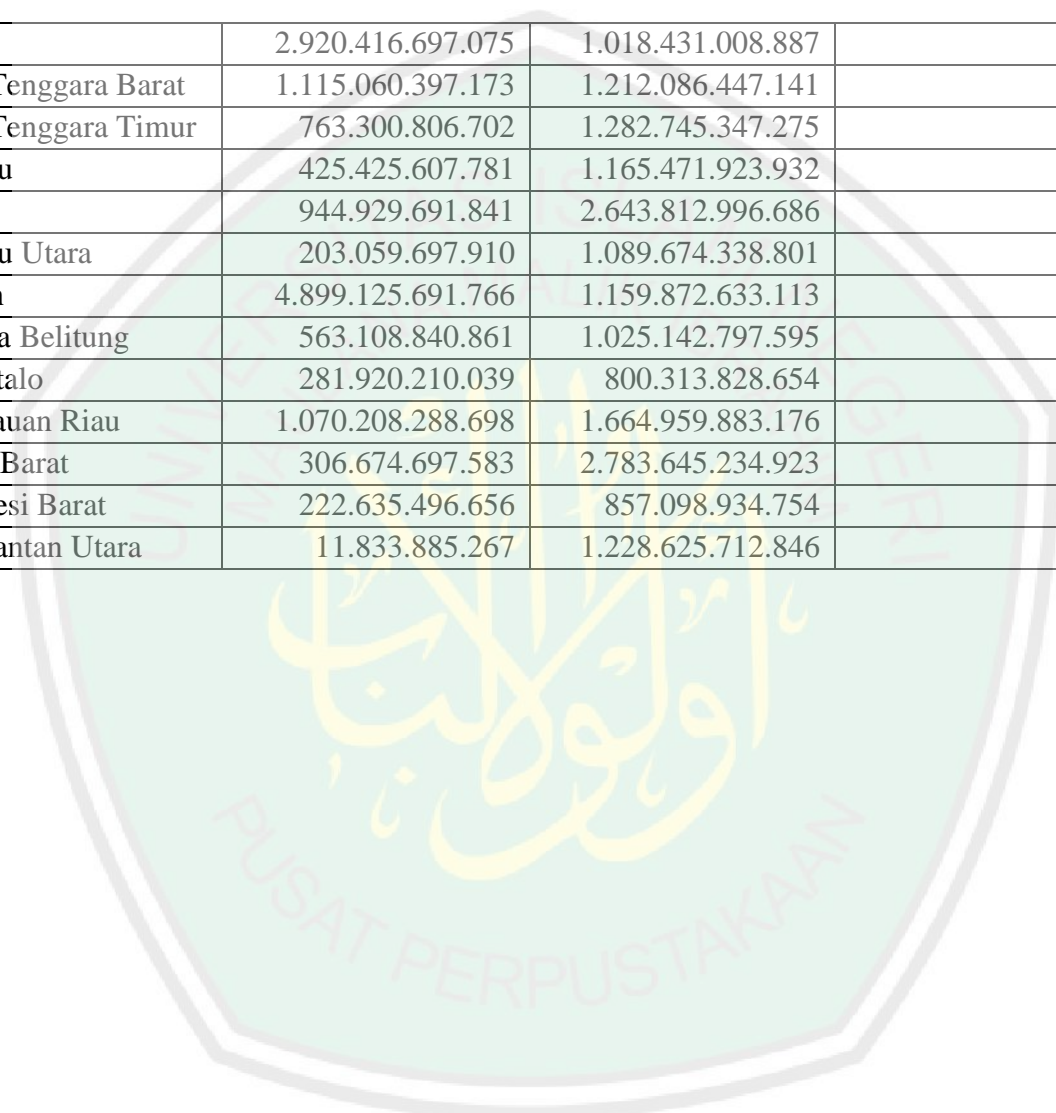
NO	NAMA PROVINSI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	Prov. Aceh	20.906.506.241.212	16.128.417.420.379	18.911.685.653.620
2	Prov. Sumatera Utara	16.465.581.739.483	12.307.648.066.987	14.152.149.422.268
3	Prov. Sumatera Barat	9.763.903.046.956	7.168.026.165.850	8.152.807.500.452
4	Prov. Riau	29.935.125.050.403	26.046.927.414.246	31.643.508.312.589
5	Prov. Jambi	8.517.755.697.517	5.390.176.322.974	6.230.703.051.278
6	Prov. Sumatera Selatan	11.844.599.755.104	13.760.363.152.959	15.278.308.894.172
7	Prov. Bengkulu	2.794.222.957.691	3.191.506.117.380	3.902.701.234.736
8	Prov. Lampung	6.109.073.617.493	4.328.153.194.287	4.883.232.964.194
9	Prov. DKI Jakarta	425.756.995.051.083	421.061.389.203.531	442.977.223.000.927
10	Prov. Jawa Barat	28.614.139.178.798	25.574.494.189.275	28.286.541.521.361
11	Prov. Jawa Tengah	25.057.414.797.938	23.671.833.181.231	30.749.242.076.898
12	Prov. DI Yogyakarta	7.085.704.720.675	5.313.019.451.168	6.050.819.887.074
13	Prov. Jawa Timur	25.914.348.383.925	26.958.068.256.119	30.127.166.768.665
14	Prov. Kalimantan Barat	5.626.886.849.281	6.913.584.525.008	7.593.574.406.129
15	Prov. Kalimantan Tengah	10.237.049.599.817	8.884.606.823.879	9.588.975.812.764
16	Prov. Kalimantan Selatan	10.728.332.295.263	10.116.946.834.569	11.138.742.854.862
17	Prov. Kalimantan Timur	30.089.700.173.299	23.428.575.292.236	23.113.184.392.170
18	Prov. Sulawesi Utara	4.576.695.729.099	4.829.525.823.823	6.150.958.263.759
19	Prov. Sulawesi Tengah	4.914.468.007.761	3.750.216.984.210	4.211.734.102.129
20	Prov. Sulawesi Selatan	7.945.615.814.350	8.146.167.988.935	9.137.116.284.120
21	Prov. Sulawesi Tenggara	7.383.457.550.987	7.545.880.421.394	8.189.043.983.872
22	Prov. Bali	6.413.739.380.986	5.616.048.443.600	8.554.849.314.154
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	11.963.681.039.485	10.918.318.404.273	11.890.842.470.329
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	6.228.497.977.950	4.485.512.908.015	5.354.336.886.083
25	Prov. Maluku	5.142.900.347.645	4.148.811.786.282	4.672.543.530.526
26	Prov. Papua	21.463.852.247.807	16.090.766.721.646	19.128.988.032.431
27	Prov. Maluku Utara	1.968.264.197.174	2.258.733.559.619	2.873.883.233.063
28	Prov. Banten	12.535.341.575.829	10.136.346.846.015	10.034.979.988.831
29	Prov. Bangka Belitung	4.358.687.025.015	3.391.450.064.906	3.776.442.444.257
30	Prov. Gorontalo	2.028.958.052.928	1.562.126.692.223	1.725.280.421.554
31	Prov. Kepulauan Riau	4.665.884.534.180	3.865.362.032.175	3.872.940.317.954
32	Prov. Papua Barat	10.130.351.024.696	7.894.905.303.026	9.030.570.639.652
33	Prov. Sulawesi Barat	1.344.418.195.971	1.565.282.539.830	1.899.310.955.012
34	Prov. Kalimantan Utara	1.455.465.437.049	1.807.408.029.500	3.085.669.426.622



RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2014 (dalam rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	DAPER	PINJAMAN	(%) RASIO KEMANDIRIAN
1	Prov. Aceh	1.731.130.839.637	2.551.683.310.691	-	67.84
2	Prov. Sumatera Utara	4.416.811.865.267	1.812.638.981.079	-	243.67
3	Prov. Sumatera Barat	1.729.222.284.040	1.333.059.018.233	-	129.72
4	Prov. Riau	3.245.087.745.090	4.231.808.633.743	3.413.333.988	76.62
5	Prov. Jambi	1.281.239.472.808	1.514.518.389.008	-	84.60
6	Prov. Sumatera Selatan	2.422.673.788.769	2.982.866.000.798	-	81.22
7	Prov. Bengkulu	672.064.468.249	1.104.582.675.517	-	60.84
8	Prov. Lampung	2.274.685.572.913	1.472.486.568.518	-	154.48
9	Prov. DKI Jakarta	31.274.215.885.720	9.677.533.225.272	-	323.16
10	Prov. Jawa Barat	15.038.153.309.919	3.260.505.636.017	-	461.22
11	Prov. Jawa Tengah	9.916.358.231.432	2.542.626.744.680	629.793.935	389.91
12	Prov. DI Yogyakarta	1.464.604.954.200	1.013.811.389.590	7.507.081.339	143.40
13	Prov. Jawa Timur	14.442.216.534.959	3.485.336.767.166	-	414.37
14	Prov. Kalimantan Barat	1.621.610.890.849	1.531.868.902.983	-	105.86
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.253.708.122.296	1.557.416.499.094	-	80.50
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.898.704.954.480	1.523.714.615.711	-	90.24
17	Prov. Kalimantan Timur	6.663.113.274.491	4.253.320.982.625	-	156.66
18	Prov. Sulawesi Utara	937.681.926.708	1.093.949.317.889	-	85.72
19	Prov. Sulawesi Tengah	824.611.352.385	1.239.776.947.097	2.236.148.199	66.39
20	Prov. Sulawesi Selatan	3.029.122.238.496	1.531.374.909.824	247.632.975.896	70.27
21	Prov. Sulawesi Tenggara	599.942.751.257	1.236.016.579.241	-	48.54

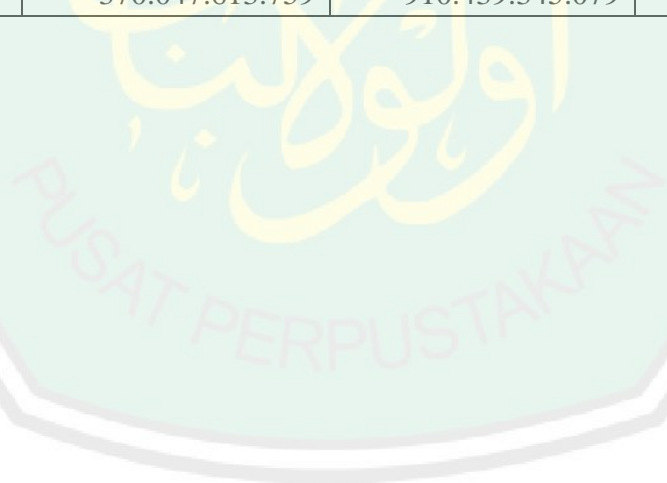
22	Prov. Bali	2.920.416.697.075	1.018.431.008.887	-	286.76
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.115.060.397.173	1.212.086.447.141	-	92.00
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	763.300.806.702	1.282.745.347.275	-	59.51
25	Prov. Maluku	425.425.607.781	1.165.471.923.932	-	36.50
26	Prov. Papua	944.929.691.841	2.643.812.996.686	-	35.74
27	Prov. Maluku Utara	203.059.697.910	1.089.674.338.801	-	18.63
28	Prov. Banten	4.899.125.691.766	1.159.872.633.113	-	422.38
29	Prov. Bangka Belitung	563.108.840.861	1.025.142.797.595	-	54.93
30	Prov. Gorontalo	281.920.210.039	800.313.828.654	-	35.23
31	Prov. Kepulauan Riau	1.070.208.288.698	1.664.959.883.176	-	64.28
32	Prov. Papua Barat	306.674.697.583	2.783.645.234.923	-	11.02
33	Prov. Sulawesi Barat	222.635.496.656	857.098.934.754	-	25.98
34	Prov. Kalimantan Utara	11.833.885.267	1.228.625.712.846		0.96



RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2015 (dalam rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	DAPER	PINJAMAN	(%) RASIO KEMANDIRIAN
1	Prov. Aceh	1.972.049.032.902	1.561.778.472.543	-	726.27
2	Prov. Sumatera Utara	4.883.880.619.308	1.521.253.168.298	-	321.04
3	Prov. Sumatera Barat	1.876.733.122.796	1.390.876.415.377	-	134.93
4	Prov. Riau	3.476.960.097.649	2.548.627.473.189	-	136.42
5	Prov. Jambi	1.241.223.028.012	1.419.079.798.364	-	87.47
6	Prov. Sumatera Selatan	2.534.526.413.315	2.329.728.331.330	-	108.79
7	Prov. Bengkulu	701.300.383.229	1.208.985.365.208	-	58.01
8	Prov. Lampung	2.247.342.667.611	1.514.291.528.636	-	148.41
9	Prov. DKI Jakarta	33.686.176.815.708	5.887.267.644.697	48.884.300.406	567.47
10	Prov. Jawa Barat	16.032.856.414.345	2.506.877.511.840	-	639.55
11	Prov. Jawa Tengah	10.904.825.812.504	2.257.142.994.740	-	483.13
12	Prov. DI Yogyakarta	1.593.110.769.595	1.021.886.268.197	-	155.90
13	Prov. Jawa Timur	15.402.647.674.503	3.115.619.118.152	-	494.37
14	Prov. Kalimantan Barat	1.702.542.350.065	1.644.655.327.863	-	103.52
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.174.969.266.557	1.673.376.686.956	61.500.000.000	67.73
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.684.908.313.881	1.576.111.339.450	1.950.116.366	170.14
17	Prov. Kalimantan Timur	4.950.160.613.906	4.024.025.055.410	-	123.02
18	Prov. Sulawesi Utara	1.012.945.961.386	1.173.041.386.645	-	86.35
19	Prov. Sulawesi Tengah	904.937.124.509	1.557.754.565.164	-	58.09

20	Prov. Sulawesi Selatan	3.270.828.511.467	1.590.754.389.411	-	205.61
21	Prov. Sulawesi Tenggara	667.079.209.826	1.383.850.899.555	58.784.889.900	46.24
22	Prov. Bali	3.041.298.422.525	1.070.197.147.350	-	284.18
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.372.661.567.125	1.450.695.264.778	-	94.62
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	882.315.240.378	1.461.922.422.707	-	60.35
25	Prov. Maluku	390.813.371.781	1.453.149.900.103	-	26.89
26	Prov. Papua	912.908.312.259	3.256.235.609.860	-	28.04
27	Prov. Maluku Utara	236.054.304.107	1.303.829.596.014	-	18.10
28	Prov. Banten	4.972.737.619.281	976.787.585.900	-	509.09
29	Prov. Bangka Belitung	571.802.890.055	1.130.400.495.449	-	50.58
30	Prov. Gorontalo	289.557.151.142	934.046.394.149	-	31.00
31	Prov. Kepulauan Riau	1.013.226.321.364	1.246.121.773.175	-	81.31
32	Prov. Papua Barat	322.799.297.752	2.496.263.896.072	-	12.93
33	Prov. Sulawesi Barat	273.507.239.233	991.630.605.275	-	27.58
34	Prov. Kalimantan Utara	370.047.613.759	910.439.345.079	-	40.64



RASIO KEMANDIRIAN PROVINSI TAHUN 2016 (dalam rupiah)

NO	NAMA PROVINSI	PAD	DAPER	PINJAMAN	(%) RASIO KEMANDIRIAN
1	Prov. Aceh	2.060.180.945.551	1.572.466.631.620	-	131.02
2	Prov. Sumatera Utara	4.954.833.100.869	5.219.273.756.069	-	94.93
3	Prov. Sumatera Barat	1.964.148.975.799	2.576.754.985.110	-	76.23
4	Prov. Riau	3.110.656.139.757	3.824.481.733.335	322.652.273	81.33
5	Prov. Jambi	1.233.514.664.110	1.547.888.628.151	-	79.69
6	Prov. Sumatera Selatan	2.546.177.544.349	2.506.312.481.085	-	101.59
7	Prov. Bengkulu	731.556.734.070	1.616.462.129.843	-	45.26
8	Prov. Lampung	2.368.796.251.247	3.158.712.900.538	-	74.99
9	Prov. DKI Jakarta	36.888.017.587.716	15.271.661.452.714	335.756.625.269	236.35
10	Prov. Jawa Barat	17.042.895.113.672	10.622.671.443.683	-	160.44
11	Prov. Jawa Tengah	11.541.029.720.310	8.017.297.595.983	905.850.000	143.94
12	Prov. DI Yogyakarta	1.673.749.196.522	1.697.108.535.480	6.197.259.975	98.26
13	Prov. Jawa Timur	15.817.795.024.797	9.039.003.358.881	-	174.99
14	Prov. Kalimantan Barat	1.664.338.991.973	1.860.789.737.696	-	89.44
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.158.303.928.014	1.878.977.521.255	-	61.65
16	Prov. Kalimantan Selatan	2.499.862.900.404	2.677.349.255.301	210.756.369	93.36
17	Prov. Kalimantan Timur	4.029.364.843.886	3.941.626.961.365	-	102.23
18	Prov. Sulawesi Utara	981.044.559.607	1.880.906.286.799	-	52.16
19	Prov. Sulawesi Tengah	939.092.069.082	2.210.604.520.193	-	42.48

20	Prov. Sulawesi Selatan	3.449.561.308.105	3.699.816.673.661	-	93.24
21	Prov. Sulawesi Tenggara	753.657.954.464	2.037.098.801.791	-	37.00
22	Prov. Bali	3.041.195.258.456	1.867.010.930.284	-	162.89
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.359.844.019.438	2.583.032.589.905	-	52.65
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	995.186.120.952	2.839.657.758.567	-	35.05
25	Prov. Maluku	466.208.198.074	2.041.954.997.675	-	22.83
26	Prov. Papua	1.019.732.912.606	3.595.089.073.914	-	28.36
27	Prov. Maluku Utara	280.150.113.343	1.453.204.504.116	-	19.28
28	Prov. Banten	5.463.156.734.851	3.185.553.940.739	-	171.50
29	Prov. Bangka Belitung	574.258.443.820	1.126.284.913.345	-	50.99
30	Prov. Gorontalo	311.223.202.412	1.232.492.163.694	-	25.25
31	Prov. Kepulauan Riau	1.079.309.741.999	1.464.904.579.643	158.100.000	73.67
32	Prov. Papua Barat	338.811.109.229	3.221.910.435.351	-	10.52
33	Prov. Sulawesi Barat	277.686.126.682	1.364.157.113.820	84.202.633.618	19.17
34	Prov. Kalimantan Utara	507.955.516.972	1.579.537.873.785	-	32.16



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 11, JALAN DR.WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON ((021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6348, 3500849; FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi

Tanggal : 11 Mei 2018

Nomor Pendaftaran : 154/PPID.KK/2018

Kami menyampaikan kepada Saudara/i

Nama : Lathifah Ridla Agustina

Alamat : Dsn. Turus Ds. Ternyang Rt. 25 Rw. 07 Kec. Sumberpucung Kab.
Malang Jawa Timur

No. Telp/Fax/Email : 081233304457 / lathifahridla@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan:

No.	Hal-hal Terkait Permohonan Informasi	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik*	<input checked="" type="checkbox"/> Tersedia Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak tersedia
2.	Bentuk informasi yang tersedia*	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> /elektronik <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i>
3.	Waktu penyediaan	Hari
4.	Penjelasan/penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**(tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:*

<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, didasarkan pada alasan sebagaimana penjelasan terlampir.
<input checked="" type="checkbox"/>	Informasi yang diminta tidak ada di Satuan Kerja kewenangan PPID.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum didokumentasikan.
<input type="checkbox"/>	Informasi yang diminta belum selesai didokumentasikan.

Jakarta, 23 Mei 2018

Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Selaku

Petugas Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kementerian
Keuangan



Muiransa Wira Sakti

Keterangan

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

**Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik a.n. Sdr. Lathifah Ridla Agustina
Nomor Pendaftaran 154/PPID.KK/2018**

Berkeenaan dengan informasi publik yang Saudara ajukan kepada PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 11 Mei 2018, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam permohonan informasi publik tersebut, kutipan informasi yang Saudara minta berupa:

- a. *Realisasi APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit;*
- b. *APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016; dan*
- c. *Neraca Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit".*

2. Atas permohonan informasi publik Saudara sebagaimana angka 1 (satu) di atas, dapat kami informasikan sebagai berikut.

a. Informasi mengenai:

- 1) realisasi APBD pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2016, dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit;
- 2) APBD pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2016; dan
- 3) neraca pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2016, dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit
tersedia pada lampiran pemberitahuan tertulis.

b. Sedangkan informasi mengenai:

- 1) neraca pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Gorontalo tahun 2012, dengan klasifikasi yang telah diaudit; dan
- 2) neraca pemerintah provinsi di Indonesia dengan klasifikasi yang belum diaudit sebagai berikut:
 - a) Provinsi Aceh tahun 2014;
 - b) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 s.d. 2016;
 - c) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 s.d. 2016;
 - d) Provinsi Riau tahun 2012, 2014, dan 2015;
 - e) Provinsi Jambi tahun 2014 s.d. 2016;
 - f) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 s.d. 2016;
 - g) Provinsi Bengkulu tahun 2014 s.d. 2016;
 - h) Provinsi Lampung tahun 2014 dan 2015;
 - i) Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015;
 - j) Provinsi Jawa Barat tahun 2013 s.d. 2016;
 - k) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 s.d. 2015;
 - l) Provinsi DI Yogyakarta tahun 2012 s.d. 2015;
 - m) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 s.d. 2016;
 - n) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 s.d. 2016;
 - o) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 s.d. 2016;
 - p) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 dan 2015;
 - q) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 s.d. 2016;

- r) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 dan 2015;
- s) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 dan 2015;
- t) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 s.d. 2015;
- u) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 s.d. 2016;
- v) Provinsi Bali tahun 2014 s.d. 2016;
- w) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012, 2014, 2015, dan 2016;
- x) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 s.d. 2016;
- y) Provinsi Maluku tahun 2012 s.d. 2016;
- z) Provinsi Papua tahun 2014 s.d. 2016;
- aa) Provinsi Maluku Utara tahun 2012 s.d. 2016;
- bb) Provinsi Banten tahun 2014 s.d. 2016;
- cc) Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 s.d. 2015;
- dd) Provinsi Gorontalo tahun 2013 s.d. 2016;
- ee) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 s.d. 2016;
- ff) Provinsi Papua Barat tahun 2013 s.d. 2016;
- gg) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 dan 2015;
- hh) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2012 s.d. 2015

tidak tersedia, karena informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Catatan:

Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor Kementerian Keuangan, menjadi tanggung jawab Pemohon/peminta data.

14



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6348, 3500849; FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Lembar depan

Nomor Pendaftaran : 154/PPID.KK/2018

(diisi oleh petugas)

Nama : Lathifah Ridla Agustina
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Turus Ds. Ternyang Rt. 25 Rw. 07 Kec. Sumberpucung Kab. Malang Jawa Timur
No. Telepon /Fax/ Email : 081233304457 / - / lathifahridla@gmail.com
No.KTP/NPWP : 3507125508960001 / -
Informasi yang diminta (tambahkan kertas bila perlu) : 1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit
2. APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016
3. Neraca Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 dengan klasifikasi yang telah diaudit dan belum diaudit.
Tujuan penggunaan informasi : Sebagai data penunjang penelitian tugas akhir perkuliahan
Bersama ini kami lampirkan : Download di [http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id/Informasi/GetBerkasFromDisk?fileName=573467060-Surat Permohonan Penelitian .pdf](http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id/Informasi/GetBerkasFromDisk?fileName=573467060-Surat%20Permohonan%20Penelitian.pdf)
Cara memperoleh informasi : Mendapatkan salinan dokumen dalam bentuk softcopy
Cara mendapatkan Informasi berupa salinan dokumen : email

Jakarta, 11 / 5 / 2018

Petugas Informasi Publik,

Pemohon Informasi Publik,

(Hesti Sulistiowati)
Nama jelas/tanda tangan/stempel

(Lathifah Ridla Agustina)
Nama jelas dan tanda tangan

Keterangan:

* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

** Coret yang tidak perlu

Lembar belakang

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali: (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lathifah Ridla Agustina
 NIM/Jurusan : 14520021/Akuntansi
 Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA
 Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 Oktober 2017	Acc Outline	1.
2.	19 Oktober 2017	Konsultasi Bab 1,2,3	2.
3.	22 Februari 2018	Proposal	3.
4.	02 Maret 2018	Acc Proposal	4.
5.	23 Maret 2018	Konsultasi bab selanjutnya	5.
6.	26 Maret 2018	Konsultasi bab selanjutnya	6.
7.	10 April 2018	Seminar Proposal	7.
8.	24 April 2018	Acc Revisi Proposal	8.
9.	24 Mei 2018	Skripsi Bab 4-5	9.
10.	05 Juni 2018	Ujian Komprehensif	10.
11.	11 Juni 2018	Acc Skripsi	11.

Malang, 21 Juni 2018

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Lathifah Ridla Agustina
Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Agustus 1996
Alamat : Dsn. Turus Ds. Ternyang Rt. 25 Rw. 07
Kec.Sumberpucung Kab. Malang
Telepon/Hp : 081233304457
E-mail : ridlalathifah@gmail.com
Facebook : LathifahRidla

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK Dharma Wanita
2002-2008 : SDN Ternyang 02
2008-2011 : SMP Negeri 04 Kepanjen
2011-2014 : SMA Negeri 01 Kepanjen

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta training “Character Building” dalam Pembinaan Mahasiswa Baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta kuliah tamu Jurusan Akuntansi tema “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”
- Peserta Diklat Menengah KOPMA Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema “Memperkuat Peran Pemuda dalam Meningkatkan Perkembangan Manajemen Koperasi”
- Peserta Seminar Nasional Mahasiswa Mandiri “Surplus”
- Peserta kuliah tamu internasional “Membedah dan Memahami Sukuk dalam Keuangan Islam” dengan narasumber Prof. Dr. Kholaf Solaman Alnemari di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Peserta seminar nasional “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, Fundraising, dan Pemasaran Syariah” oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang